

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI I **RENCANA STRATEGIS** 2020-2024



<https://ditjenpkh.pertanian.go.id>



**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020-2024. Tahun 2020-2024 merupakan periode yang cukup strategis dalam rangka menyongsong tahun 2045 yang diprediksikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga internasional bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke 4 di dunia Tahun 2042. Pada saat itu, PDB Indonesia telah mencapai 9,1 juta US\$ dan pendapatan/kapita Rp 27 juta/tahun serta penduduk berjumlah 310 juta jiwa.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebagai bagian dari sektor pertanian akan mengikuti terus perubahan-perubahan yang akan terjadi terutama perubahan kebijakan dan teknologi. Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi pembangunan pertanian, salah satunya subsektor peternakan. Hal ini menyebabkan perubahan pada fokus kegiatan, struktur anggaran dan kebijakan lainnya Ditjen PKH, sehingga dilakukan revisi Renstra Ditjen PKHTahun 2020-2024.

Revisi I Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 menyelaraskan dengan Revisi Renstra Kementan Tahun 2020-2024 untuk indikator dan targetnya. Dengan demikian, penyusunan Revisi I Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

Jakarta, 9 Desember 2020
 Direktur Jenderal,

 Nasrullah





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 13973/Kpts/HK.200/F/12/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR

13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN

2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 Telah ditetapkan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan pada Rencana Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/KPTS/RC.020/M/11/2020 sehingga perlu penyesuaian Rencana Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/KPTS/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020-2024.



- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP 19660223 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN DIRJEN PKH	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Kinerja Ekonomi Makro.....	2
1.1.2. Kinerja Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	9
1.2.1. Potensi (Kekuatan dan Peluang).....	9
1.2.2. Permasalahan.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	17
2.1. Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	17
2.2. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	18
2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan.....	20
2.4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (SP dan IKSP).....	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	33
3.2. Dukungan Peternakan dan Keswan dalam Pengarusutamaan dan Proyek Prioritas Nasional.....	37
3.3. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.....	38
3.3.1. Kerangka Regulasi.....	38
3.3.2. Kerangka Kelembagaan.....	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1. Target Kinerja.....	43
4.2. Kerangka Pendanaan.....	44
BAB V PENUTUP.....	47
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1.....	50-97
LAMPIRAN 2.....	98-108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	23
Tabel 2.2	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program	27
Tabel 3.1	Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Keterkaitan Ditjen PKH	32
Tabel 3.2	Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan dan Ditjen PKH	36
Tabel 3.3	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi	38
Tabel 4.1	Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing	3
Gambar 3.1	Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP)	30
Gambar 3.2	Kerangka Kelembagaan Ditjen PKH	40





DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 adalah unit kerja Eselon I yang berada dibawah Kementerian Pertanian, sesuai bagian ketujuh Pasal 20, berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Menteri, dan dipimpin oleh Direktur Jenderal PKH, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa susunan organisasinya terdiri dari satu orang Eselon I A, 6 orang Eselon II A, 26 orang Eselon III A, dan 61 orang Eselon IV A. Fungsi dari Ditjen PKH tersebut dirumuskan menjadi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Selain itu, Ditjen PKH berfungsi untuk pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Bappenas Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Renstra Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, diwajibkan kepada Ditjen PKH untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJMN). Ditjen PKH sebagai salah satu Direktorat Jenderal Teknis yang menjabarkan kebijakan Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH menyelaraskan Renstranya dengan Revisi Pertama Renstra Kementerian Pertanian



Tahun 2020-2024. Revisi dilakukan dengan pertimbangan: (1) terdapatnya kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan terdapatnya perubahan dalam *focusing* kegiatan, struktur penganggaran dan kebijakan penting yang diambil pada sektor pertanian saat ini, (2) terdapatnya lag waktu proses terbitnya rencana strategis yang terbit lebih dahulu yaitu pada tanggal 04 Mei 2020 dibandingkan dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, sehingga dipandang perlu adanya penyesuaian deskripsi terkait target maupun program dan (3) merespon dinamika kebijakan, dengan terdapatnya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Renstra Ditjen PKH sebagai pijakan pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020-2024, yang juga menggambarkan secara utuh capaian kinerja pembangunan sebelumnya yakni : capaian kinerja makro maupun kinerja teknis. Kinerja makro, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sedangkan kinerja teknis berupa populasi, produksi dan tingkat konsumsi sebagai cerminan pelaksanaan kinerja fungsional yaitu aspek perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta dukungan kesekretariatan.

1.1.1 Kinerja Ekonomi Makro

1. Produk Domestik Bruto

PDB sub sektor peternakan pada periode 2014-2018** menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB sektor pertanian. PDB sub sektor peternakan tahun 2014 mencapai sebesar Rp132.221,1 miliar meningkat menjadi sebesar Rp155.152,2 miliar atau meningkat 4,08% pertahun sedangkan PDB sektor pertanian Rp880.389,5 miliar meningkat menjadi Rp 1.005.440,8 miliar atau meningkat sebesar 3,37% pertahun (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).-



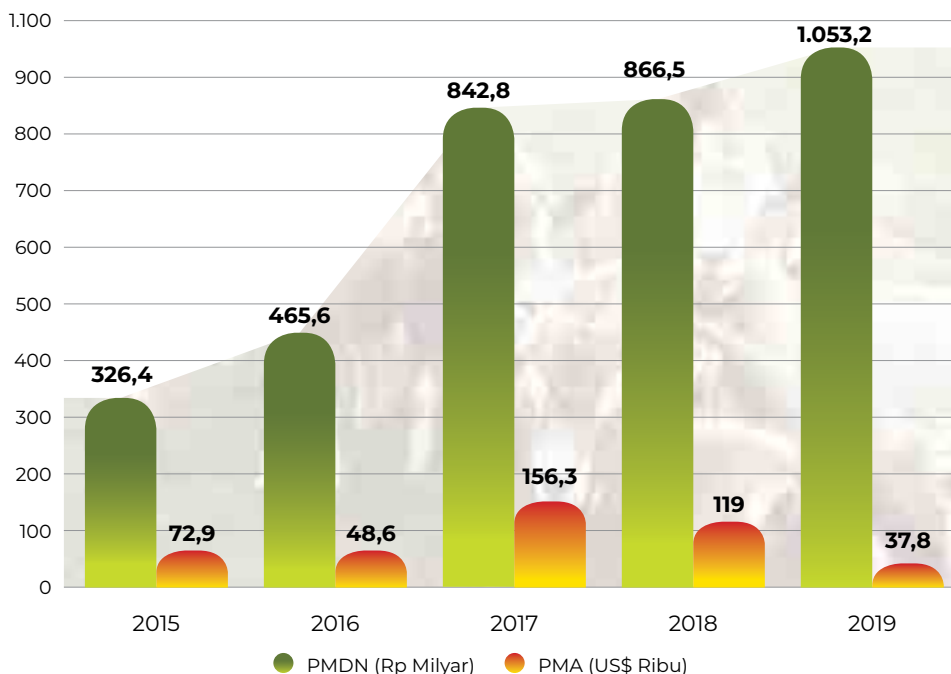
2. Investasi

Investasi sub sektor peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2015-2019 yaitu dari Rp326,4 miliar menjadi Rp1.503,2 miliar secara komulatif meningkat sebesar Rp726,8 miliar. Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 37,10% yang meningkat konsisten dari tahun ke tahun. Nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar 24,04%, peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 222%. (Sumber: BKPM diolah)

Sebagai gambaran investasi sektor peternakan periode 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

KINERJA INVESTASI SUBSEKTOR PETERNAKAN



3. Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam periode tahun 2014-2018, penyerapan tenaga kerja, subsektor peternakan meningkat 4,18 pertahun, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.831.211 orang pada tahun 2018 (BPS, Sakernas-Februari). Berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerja peternakan di dominasi oleh tenaga berpendidikan SD yaitu sebanyak 1.610.057 orang (33,3%), dengan kelompok umur yang didominasi oleh golongan umur tua (60 tahun ke atas) sebanyak 1.132.175.orang (23,75 %) dan apabila dilihat dari status pekerjaan utamanya adalah pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 1.736.149 orang (36,43 %) (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019)

4. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)

Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) periode 2019 sebesar 108,04 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 106,65. NTPT lebih dari 100 menunjukkan peternak mengalami surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 0,26% (Sumber: BPS Tahun 2020).

1.1.2 Kinerja Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Populasi Ternak

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak periode 2015-2019 terbesar yaitu ayam ras pedaging (23,39%) dan ayam ras petelur (18,41%), Untuk populasi sapi potong dan sapi perah tumbuh positif sebesar 2,66% dan 2,05%. Untuk ternak kecil yang terdiri dari kambing , domba dan babi masing-masing tumbuh 0,02%; 1,29% dan 3,44%. Populasi ternak yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kerbau -1,65% dan kuda -2,14% (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).

2. Produksi Ternak

Berdasarkan pertumbuhan produksi ternak periode 2015-2019, jumlah produksi daging ayam ras pedaging mendominasi dengan rata-rata pertumbuhan 23,39% pertahun. Sedangkan daging sapi potong dan kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar



0,75% dan 9,20%. Untuk rata-rata pertumbuhan telur ayam ras petelur, ayam buras dan susu masing-masing meningkat sebesar 55,66%; 3,82% dan 4,56% (Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2019).

Sesuai dengan Renstra tahun 2014-2019, produksi ternak yang tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu telur sebesar 5.355,6 ribu ton (capaian 140,44%) dari target 3.770 ribu ton sedangkan target produksi ternak yang tidak tercapai yaitu: daging sapi/kerbau sebesar 514,4 ribu ton (capaian 68,13%) dari target 755 ribu ton dan susu sebesar 996,44 ribu ton (capaian 93,69%) dari target 1.063,56 ribu ton.

Dari aspek konsumsi, konsumsi daging sapi menunjukkan bahwa konsumsi daging selama 2014-2018 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2014 konsumsi tersebut disetarakan dengan protein hewani menunjukkan 2,68 gram protein. Sedangkan pada tahun 2018 menjadi 3,73 gram protein/hari/kapita dan telur pada periode yang sama naik 3,17 gram/kapita/hari menjadi 3,5 gram/kapita/hari (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).

3. Sertifikasi Bibit Ternak

Produksi benih dan bibit selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut : 1) Produksi benih : sebanyak 24.117.522 dosis atau 100,39% dari target 24.023.00 dosis untuk semen beku dan 5.495 embrio atau 171,62% dari target 3.202 embrio; dan 2) Produksi bibit : sapi potong sebanyak 4.522 ekor atau 114,37% dari target 3.954 ekor; sapi perah 1.467 ekor atau 122,25% dari target 1.200 ekor; kerbau 293 ekor atau 48,03% dari target 610 ekor; kambing perah 764 ekor atau 132,87 % dari target 575 ekor; kambing 1.209 ekor atau 104,68% dari target 1.155 ekor; babi 2.782 ekor atau 70,50% dari target 3.946 ekor; ayam 1.249.429 ekor atau 132,90% dari target 940.100 ekor; serta itik 2.169.993 ekor atau 133,53% dari target 1.625.057 ekor (Lakin Bitpro 2019 data diolah).



Selain produksi benih dan bibit, kinerja perbibitan dan produksi ternak juga dapat dilihat dari sertifikasi bibit yang dikeluarkan sebanyak 312 ekor sapi potong, 103 ekor kambing, 110 ekor domba, 2.755.000 straw semen beku dan 22 ekor babi. Selama kurun waktu tersebut ada sebanyak 16 rumpun galur ternak yang telah dikeluarkan (Lakin Bitpro 2019 data diolah)

4. Status Kesehatan Hewan

Upaya mendukung kegiatan status kesehatan hewan melalui pembebasan penyakit. Dalam periode 2015-2017 telah dilakukan pembebasan terhadap 14 wilayah untuk penyakit Rabies, AI, Brucellosis dan Septicemia Epizootica. Capaian kinerja status kesehatan hewan pada tahun 2019 sebesar 78,1% dari target 80%. Capaian status kesehatan hewan dibawah target dikarenakan beberapa hal antara lain: (1). Adanya wabah Rabies di beberapa lokasi di Provinsi NTB; dan (2). Adanya penurunan jumlah provinsi bebas rabies semula 9 Provinsi menjadi 8 Provinsi karena Provinsi NTB sebelumnya merupakan wilayah bebas Rabies

Disamping itu, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 87 kompartmen bebas AI untuk Breeding Farm aktif, yaitu: sebanyak 9 perusahaan GPS (Grand Parent Stock, 39 Perusahaan PS (Parent Stock), 18 perusahaan FS (Final Stock), 21 perusahaan Hatchery di 14 provinsi (Lakin Ditjen PKH 2019).

5. Penjaminan Keamanan Pangan Strategis Nasional

Upaya Penjaminan Produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan dilaksanakan melalui serangkaian upaya mulai dari pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi unit usaha dan produk hewan. Produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus berasal dari unit usaha yang telah menerapkan sistem penjaminan keamanan pangan yang dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.



Selanjutnya untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan, dan guna mendorong pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan yang diproduksi, dimasukkan dari dan/atau dikeluarkan ke luar negeri, dan yang diedarkan didalam negeri, juga dilakukan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan, pengawasan peredaran produk hewan serta monitoring surveilans keamanan pangan produk hewan.

Sampai dengan tahun 2019, terdapat unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikat NKV sebanyak 2.453 unit usaha, meningkat 233 unit usaha dari tahun 2018 sebanyak 2.020 unit usaha. Sedangkan untuk jumlah kasus pangan segar asal hewan yang membahayakan kesehatan manusia terjadi penurunan kasus, dari 16 kasus di tahun 2018 menjadi 10 kasus di tahun 2019.

Terkait dengan monitoring surveilans keamanan pangan produk hewan, telah dilakukan pengujian terhadap 30.745 sampel produk hewan, dengan hasil sebanyak 81% produk hewan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Selain itu dalam upaya memenuhi persyaratan kesehatan produk hewan untuk ekspor, pada tahun 2019 telah dikeluarkan sebanyak 3.439 Sertifikat Veteriner, yang meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3.332 Sertifikat Veteriner. Peningkatan penerbitan sertifikat veteriner ini menunjukkan bahwa produk hewan asal Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor dan berdaya saing (Lakin Ditjen PKH 2019).

6. Penyediaan Infrastruktur Peternakan

Penyediaan infrastruktur peternakan tahun 2015-2019 diprioritaskan untuk penyediaan sarana dan prasarana RPH-Ruminansia dan tempat pemotongan hewan kurban. Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) yaitu RPH atau

fasilitas pemotongan hewan kurban berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit dengan pertimbangan bahwa RPH atau fasilitas pemotongan hewan kurban tersebut dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2019 rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak ditargetkan sebesar 30%. Adapun realisasi ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebesar 34,60% dari target 30% (tersedia sebanyak 178 unit) (Lakin Ditjen PKH 2019).

7. Peningkatan Volume ekspor

Capaian kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun 2019 sebesar 78,65 % atau meningkat 314,60 % dari target 25 % dan bila dilihat secara volume, ekspor tahun 2019 sebesar 32.491,14 ton meningkat dari tahun 2018 sebesar 29.145,04 ton. Apabila dilihat dari nilainya, ekspor hewani asal ternak tahun 2019 sebesar US\$ 78.654.179,58 meningkat dari tahun 2018 sebesar US\$ 71.190.478,16 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 62,92% (Lakin Ditjen PKH 2019).

Volume ekspor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari volume ekspor 7 (tujuh) komoditas, yaitu: ternak kambing, domba, babi, daging ayam potong, telur tetas, anak ayam (*Day Old Chick* – *DOC*), serta obat hewan. Ekspor ternak babi selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,83% per tahun.

Ekspor ternak kambing dan domba selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan untuk ternak kambing (95,85%) sedangkan ternak domba baru mulai diekspor pada tahun 2018 sebesar 81,5 ton. Telur ayam tetas, daging ayam dan produk olahannya serta obat hewan merupakan komoditas yang berkontribusi terhadap peningkatan volume ekspor pada tahun 2015-2019. Sedangkan DOC baru diekspor pada tahun 2018-2019 dengan tujuan ekspor adalah Timor Leste.



8. Penurunan Volume Impor

Volume impor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari 9 (sembilan) komoditas, yaitu: susu, mentega, keju, yoghurt, sapi hidup, daging lembu, jeroan lembu, sosis, dan itik. Pada periode dua tahun (2018-2019), penurunan impor terjadi pada dua komoditas, yaitu itik dan yoghurt. Untuk komoditas daging lembu dan jeroan lembu, serta susu dan kepala susu belum mampu menurunkan volume impor dikarenakan meningkatnya kebutuhan komoditas tersebut di dalam negeri. Selain itu, penyebab adanya peningkatan impor daging dan jeroan juga karena ada perubahan regulasi untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan WTO (*World Trade Organization*).

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk melihat potensi dan permasalahan pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilihat dari faktor lingkungan strategis internal maupun eksternal yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan peternakan. Lingkungan strategis internal mencakup aspek kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal mencakup aspek ancaman dari luar dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisis dengan metode SWOT, untuk memilih aspek aspek internal dan eksternal strategis untuk dijadikan dasar dalam merumuskan alternatif strategi prioritas dalam mendukung kinerja pembangunan.

1.2.1. Potensi (Kekuatan dan peluang)

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan antara lain: jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman hayati, teknologi dan pasar luar negeri

1. Jumlah Rumah Tangga Peternakan 13,56 juta orang (Sutas, 2018)
Peternakan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia secara turun menurun. Usaha peternakan dilakukan oleh masyarakat secara polivalen (terpadu) dengan kegiatan ekonomi lainnya di bidang pertanian. Dengan banyaknya masyarakat melakukan usaha peternakan walaupun dengan skala yang kecil dan dikelola secara sambilan,



usaha peternakan ini memiliki peran dalam menopang ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga peternakan sebanyak 13,56 juta rumah tangga atau sebesar 21,43% dari rumah tangga pertanian.

2. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan)
Indonesia sebagai suatu negara agraris mempunyai sumber daya alam dan ternak yang sangat besar dan beragam. Keberagaman sumber daya ternak yang tersebar diwilayah-wilayah belum mampu dimanfaatkan secara ekonomis dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Dukungan sumber daya alam lainnya, utamanya dalam penyediaan pakan untuk pertumbuhan ternak sangat besar dengan keragaman yang cukup tinggi. Disamping itu, keragaman budaya dari masyarakat yang sangat heterogen menghasilkan berbagai ragam produk pangan hasil ternak yang merupakan kekuatan penyediaan terhadap produk peternakan. Potensi ragamnya genetik ternak dan produk olahan asal ternak dapat mengantisipasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.
3. Sinergi dan dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia.
Keberhasilan pembangunan peternakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta dan akademisi. Peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan stabilisator merupakan modal penting dalam menumbuhkan usaha peternakan yang kondusif dan berkeadilan utamanya bagi peternak rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan peternakan Indonesia.

Untuk itu peternak rakyat, sebagai subjek pembangunan yang kreatif dan dinamik harus terus didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan peternakan. Pemberdayaan peternak berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian peternak. Pemberdayaan peternak dapat dilakukan dengan



cara: menciptakan iklim usaha yang memungkinkan peternak berkembang; meningkatkan kemampuan petenak melalui berbagai pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah; dan menciptakan kemitraan peternakan yang saling menguntungkan

4. Pangsa Pasar ekspor produk peternakan meningkat
Pada periode 2015-2019, beberapa produk ternak mengalami peningkatan produksi antara lain daging ayam ras pedaging (23,39%), telur ayam ras petelur, ayam buras, daging kambing meningkat sebesar 55,66%; 3,82% dan 20,78. Kelebihan produksi ini dapat dijadikan peluang ekspor keluar negeri. Peluang ekspor semakin terbuka dengan status kesehatan hewan yang dimiliki Indonesia yaitu bebas penyakit list A (PMK). Peluang ekspor kambing dan domba sangat potensial mengisi segmen pasar di Asia dan Timur Tengah ditopang dengan keunggulan komparatif yang ada.
5. Kesadaran global tentang keamanan pangan (*food safety*), *bio security* dan kesejahteraan hewan
Beragamnya produk pangan hasil ternak diharapkan dapat meningkatkan pola konsumsi pangan untuk pemenuhan protein hewani asal ternak. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menuntut ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas. Pemerintah dan pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan pangan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam penyediaan pangan yang aman dan berkualitas, penerapan cara yang baik di rantai produksi pangan termasuk penerapan kesejahteraan hewan menjadi faktor penting yang harus dilaksanakan.

1.2.2. Permasalahan

1. Usaha peternakan yang bersifat Subsiten dan rendahnya partisipasi kelembagaan Peternak
Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat



sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak.

Hasil SOUT 2017 menyebutkan bahwa partisipasi peternak yang mengikuti bimbingan penyuluhan usaha peternakan hanya sebesar 5,65 %, dan dari jumlah tersebut 7,86% adalah peternak sapi potong. Informasi terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak. Sebanyak 82.13% peternak tidak mengikuti penyuluhan dan bimbingan teknis usaha peternakan dimana 79,73 % adalah peternak sapi potong. Alasan dominan peternak tidak mengikuti bimbingan dan penyuluhan usaha peternakan adalah peternak merasa tidak perlu dengan materi penyuluhan yang diberikan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan karena tanpa adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan ternak dan pengelolaan usaha peternakan melalui kegiatan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis dan manajemen usaha maka risiko ketidakberhasilan kegiatan harus dapat segera dimitigasi.

2. Rendahnya pemanfaatan plasma nutfah sebagai keunggulan komparatif untuk dikembangkan secara ekonomis.
Indonesia yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah ternak yang tersebar di wilayah Indonesia, namun keunggulan komparatif ini belum dapat dimanfaatkan secara ekonomis untuk didorong sebagai keunggulan kompetitif dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Untuk meningkatkan pengembangan dan kontribusi plasma nutfah ternak Indonesia, dapat dilakukan pengembangan dan perbaikan mutu genetik secara terus menerus, sekaligus dikembangkan secara ekonomis melalui kawasan sumber bibit ternak.



3. Keterbatasan lahan untuk subsektor peternakan.
Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
4. Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan dan liberalisasi pasar
Persaingan dan globalisasi ekonomi yang melanda dunia, termasuk dalam investasi asing. Liberalisasi pasar dengan semakin terbukanya informasi pasar mendorong negara mencari pasar yang paling menguntungkan. Persaingan dan liberalisasi berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi sehingga arus informasi dan transportasi ke negara lain semakin dekat, terutama masuknya barang-barang luar negeri. Selain itu, Indonesia saat ini merupakan negara pengimpor hasil ternak terutama daging sapi, ternak hidup, dan bibit ayam ras. Dari sisi industri, Indonesia mengimpor kulit ternak, bahan baku pakan asal ternak seperti *meat meal* dan *bone meal*, tepung ikan, jagung dan berbagai *feed supplement* pakan ternak. Ketergantungan bahan utama industri dari impor ini sangat mempengaruhi perkembangan peternakan dalam negeri. Untuk mengantisipasi ketergantungan impor produk peternakan, yang dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Lemahnya Posisi dalam Perjanjian Internasional
Terbukanya pasar global harus disertai persiapan yang matang terutama perjanjian internasional utamanya dalam

hal perdagangan atau arus barang. Perjanjian yang tidak disikapi dengan matang dan lemahnya posisi tawar akan mengancam industri peternakan dalam negeri dan kedaulatan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO) harus mengantisipasi fenomena dan dinamika perkembangan internasional maupun regional terutama dalam bidang perdagangan hewan dan produknya melalui reorientasi terhadap kebijakan perdagangan dengan memfokuskan perhatian terhadap salah satu aspek yang sangat penting dari perjanjian GATT yaitu “Perjanjian tentang Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan” (*Sanitary and Phytosanitary/SPS*).

Dari aspek kesehatan hewan, meningkatnya lalu lintas hewan dan produknya akan membawa risiko masuknya penyakit hewan ke wilayah Indonesia. Indonesia yang telah dinyatakan bebas terhadap 13 dari 15 penyakit hewan menular menurut daftar A dan beberapa penyakit menurut daftar B dari OIE (*Office Internationale des Epizooties*) perlu mengantisipasi melalui reorientasi kebijakan dengan menepati kesepakatan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* untuk keamanan pangan dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan.







DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1. VISI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sesuai dengan arahan Presiden yang menjelaskan bahwa hanya ada visi dan misi presiden dan wakil presiden, maka Kementerian dan Lembaga dalam perumusan visi dan misi-nya, harus selaras dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden dalam RPJMN 2020-2024, untuk visi yaitu :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Selanjutnya untuk menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut maka visi Kementerian Pertanian mendukungnya dengan:

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Selaras dengan kedua visi di atas, Ditjen PKH sebagai salah satu Eselon I di bawah Kementan merumuskan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”.

Visi Ditjen PKH bermakna:

1. Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor. Daya saing subsektor peternakan adalah kemampuan subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan.
2. Peternakan indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus berbasis sumber daya lokal untuk penyediaan pangan masyarakat



3. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

2.2. MISI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Upaya strategis dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.



3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara.

Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat.

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejehteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional.

Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antara lain melalui : peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional dan modern.

Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik.

Misi Ditjen Peternakan dan Keswan di atas, sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian dan meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana Kementerian Pertanian.

2.3. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan penting dari pembangunan Ditjen PKH selama 2020-2024 mencakup :

1. Tersedianya benih/bibit ternak yang berkualitas

Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi. Untuk itu kualitas, kuantitas dan



kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumber daya lokal harus dapat diwujudkan dengan baik. Upaya untuk penyediaan bibit dan benih ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan baik secara teknis maupun manajerial.

2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting didalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, murah dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam sistem produksi yang efisien. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan pakan lokal termasuk biomassa ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan menunjang peningkatan produksi.

3. Meningkatnya kesehatan hewan

Peningkatan kesehatan hewan ditujukan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) serta penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (zoonosis).

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan disuatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional.

Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Produk peternakan baik pangan maupun non pangan harus mampu berkompetisi dengan produk sejenis dari luar, untuk itu peningkatan kualitas dan daya saing produk harus dapat diwujudkan. Disamping untuk penyediaan dalam negeri diharapkan produk peternakan juga mampu diekspor untuk pasar luar negeri. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk dilakukan melalui peningkatan SDM, pemenuhan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi modern mulai dari proses pengolahan sampai distribusi pemasaran.

6. Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.

Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, maka perbaikan 8 area perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut aspek kelembagaan, SDM, tata kelola aset, kebijakan, program dan penganggaran akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan.

Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tersebut dipetakan pada Tujuan dan Indikator tujuan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas bibit/benih ternak secara berkelanjutan	1. Tersedianya bibit/benih ternak berkualitas dan berkesinambungan	1. Jumlah bibit/benih ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat)
	2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pakan secara berkelanjutan	2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan	2. Indeks ketersediaan pakan berkualitas (indeks)
	3. Menyelenggarakan kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kesehatan hewan	3. Status Kesehatan Hewan (%)
Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan	4. Menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan daya saing produk hewan dan kesehatan masyarakat	4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional	4. Jaminan kesehatan masyarakat veteriner (%)
	5. Meningkatkan pengolahan, dan pemasaran produk peternakan berdaya saing	5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	5. Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton)
	6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional	6. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai <i>roadmap</i> RB Kementan	6. Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif
			7. Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (indeks)

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan misi serta tujuannya merupakan mata rantai yang saling mendukung. Untuk mencapai visi dimaksud maka misi yang dibebankan kepada Ditjen PKH dan tujuan yang diinginkan beserta indikator tujuannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.



2.4. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (SP DAN IKSP)

Berdasarkan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH memiliki Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah terbentuknya program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama kurun waktu 2020-2024 dan program tersebut memiliki kegiatan. Masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki indikator sasaran yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Based*). Adapun berbagai sasaran program tersebut adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak.

Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu.

Target capaian produksi kurun waktu 2020-2024 dengan peningkatan produksi daging (1,28%); susu (2,9%), dan telur (2,16%) dan target produksi masing-masing komoditas setiap provinsi dapat di Lampiran 1. Dengan rata-rata pertumbuhan daging tersebut maka sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN baik target produksi dan kontribusi angka kecukupan protein hewani dapat tercapai.

2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.

Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak.

Kinerja Keamanan dan Mutu Pangan diukur berdasarkan persentase pangan asal hewan (definisi hewan) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya indeks keamanan dan



mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan “halal” (definisi ASUH) (SP3 dan SS3).

4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan

Tersedianya sarana prasarana peternakan Indikator kinerja sasaran program ini diukur dari tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan sarana prasarana dari hulu sampai hilir dalam sistem produksi ternak diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.

Sasaran program ini indikatornya adalah persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia

Sasaran program ini adalah terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dengan indikator kinerja jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dapat mencapai sasaran strategis yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

7. Terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Indikator kinerja sasaran program diukur dari seberapa jauh nilai RB Ditjen PKH dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen PKH yang dilihat dari berapa nilai dari skala *likert*. Pencapaian nilai RB dan indeks kepuasan masyarakat dengan sasaran program mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan.



8. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran program terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Dirjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementan

Manual Indikator Sasaran Program dan Kegiatan akan disusun lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen Renstra PKH tahun 2020-2024.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal bulan Maret 2019 dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pergerakan barang dan jasa termasuk produk peternakan. Salah satu dampak yang terlihat signifikan selama pandemi Covid-19, adanya penurunan harga karena over supplay, terutama daging ayam ras. Hal ini menyebabkan Ditjen PKH harus mengubah target indikator level 1 dan diselaraskan dengan Renstra Kementan yang direvisi pada Bulan November Tahun 2020. Indikator Kegiatan Sasaran Program (IKSP) yang berubah antara lain: a) produksi daging yang semula jumlah menjadi peningkatan produksi dengan satuan %; b) pertumbuhan volume ekspor berubah menjadi pertumbuhan nilai ekspor; c) indeks ketersediaan sarana menjadi tingkat kemanfaatan sarana.

Perubahan sasaran program dan indikator program level 1 secara rinci disajikan pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak						
Peningkatan Produksi daging (%)	4480,8 ribu ton	0,4	0,85	1,2	1,24	1,28
Peningkatan Produksi susu (%)	994,54 ribu ton	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Peningkatan Produksi telur (%)	5.355,62 ribu ton	2,15	2,15	2,16	2,16	2,16
SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan						
Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%)	US\$ 744,3 ribu	15	15	20	25	30
SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak						
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	80	81,5	82	82,5	83	83,5
SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan yang sesuai kebutuhan						
Tingkat pemanfaatan sarana prasarana peternakan (%)		85	87	90	92	95
SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan						
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	80	80	80,5	80,5	81	81
SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia						
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus)	122	122	120	118	116	114
SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai)	22,01	32,3	32,75	33,5	34	35,5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4))	3,4	3,37	3,44	3,51	3,55	3,58
SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas						
Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai)	87,82	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85



DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan sektor pertanian (termasuk sub sektor peternakan) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1).
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2).
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4).
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5).
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelay

RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

(BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga *Project Major* diantaranya:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit
3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

Prioritas Nasional (PN) kemudian diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas, pada Gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1 Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP)



Berdasarkan Gambar 3.1, Program Prioritas (PP) yang menjadi kontribusi penting Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (PP6). Ditjen PKH akan berkontribusi terhadap Prioritas Nasional 1 (PN 1) dengan Program Prioritas 3 (PP3) dan Program Prioritas 6 (PP6)



PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan Program Prioritas (PP3): Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan secara nasional mempunyai indikator dan target sebagai berikut:

- a. Skor Pola Pangan Harapan : 2020 (90,4%) dan 2024 (95,2%)
- b. Angka kecukupan protein (AKP) sebesar 57 g/kapita/hari selama tahun 2020-2024.
- c. Produksi daging: 2020 (4,1 juta ton) dan 2024 (4,6 juta ton)
- d. Konsumsi daging: 2020 (13,5 kg/perkapita/tahun) dan 2024 (14,7 kg/perkapita/tahun)
- e. Konsumsi protein asal ternak: 2020 (10,7 gram/kap/hari) dan 2024 (11,0 gram/kap/hari)
- f. Ketersediaan protein hewani: 2,5 juta ton (2020) dan 2,9 juta ton (2024)

Selain itu, kontribusi Ditjen PKH terhadap PN 1 juga menyangkut meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan ekspor dan daya saing perekonomian terkait dengan PP 6, yaitu Peningkatan nilai tambah dan investasi sektor riil dan industrialisasi. Indikator dan targetnya yaitu pertumbuhan PDB pertanian : 2020 (3,5%) dan 2024 (4,0-4,1%).

Kontribusi Ditjen PKH terhadap PP, KP dan Indikator RPJMN (PP Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian) disajikan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1 . Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Keterkaitan Ditjen PKH

PROGRAM PRIORITAS (PP) / KEGIATAN PRIORITAS (KP)	Sasaran Program dan	
INDIKATOR RPJMN	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	
PP3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	
Skor Pola Pangan Harapan	1	Peningkatan produksi daging (%): 0,4 (2020) dan 1,28 (2024)
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	2	Peningkatan produksi susu (%): 2,6 (2020) dan 2,9 (2024)
KP 1 . Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	3	Peningkatan produksi telur (%):2,15 (2020) dan 2,16 (2024)
Konsumsi daging (13,5 - 14,7 kg/kapita/tahun)	SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan	
Konsumsi protein asal ternak (10,7 - 11,0 gram/ kap/hari)	4	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%): 15 (2020) dan 30 (2024)
KP 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan	SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	
Produksi Daging (juta ton)	5	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%): 81,5 (2020) dan 83,5 (2024)
Ketersediaan protein hewani (2,5 - 2,9 juta ton)	SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan	
KP 3. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian	6	Tingkat pemanfaatan sarana prasarana peternakan (%):85(2020) dan 95 (2024)
Nilai Tukar Petani	SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan	
KP 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian	7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%): 80 (2020) dan 81 (2024)
Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Akses)	SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	
KP 5. Peningkatan tata nasionalkelola sistem pangan	8	Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus): 122 (2020) dan 114 (2024)
Global food security index	SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	
	9	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 32,3 (2020) dan 35,5 (2024)
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4)): 3,37 (2020) dan 3,58 (2024)
	SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	
	11	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 88,25 (2020) dan 90,85 (2024)



Dari berbagai kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan kementerian pertanian akan berperan untuk ketersediaan protein hewani, peningkatan produksi daging, keamanan pangan asal ternak, penerapan teknologi dan ekspor produk peternakan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan peternak terlihat dari pertumbuhan PDB peternakan dan nilai tukar petani.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan *Good Breeding* dan *Good Farming Practises*.**

Good Breeding Practises dan *Good Farming Practises* adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practises* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. **Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan Kesehatan hewan**

Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang



dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan

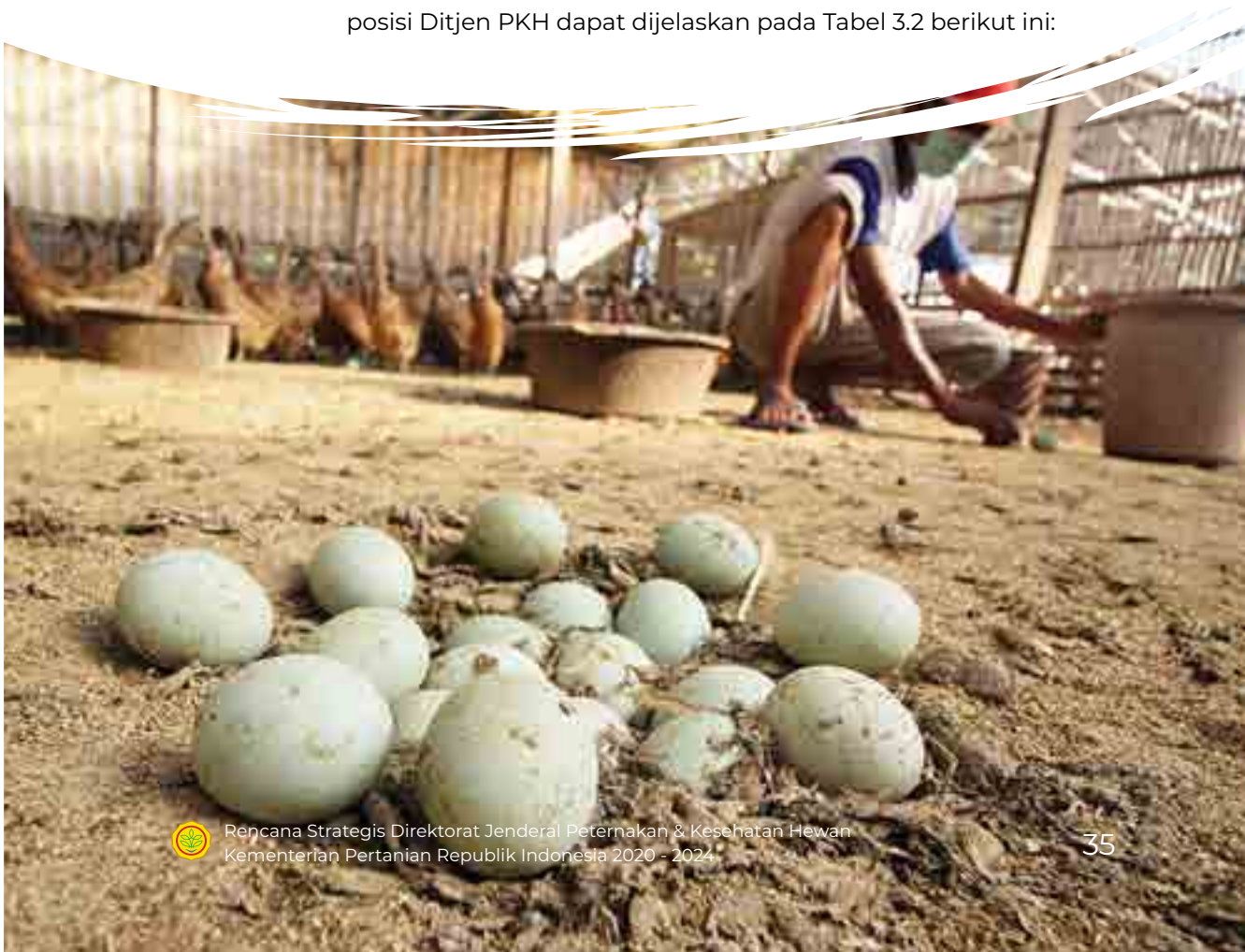


pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Dikaitkan dengan arah kebijakan dan strategi Kementan maka posisi Ditjen PKH dapat dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini:



Tabel 3. 2 Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan dan Ditjen PKH

No	Arah kebijakan dan Strategi Kementan	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKH
1	Terjaganya ketahanan pangan nasional. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian;2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional;3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;	Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.2. Penyediaan pakan yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan berbasis bahan pakan lokal.3. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia2. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.
2	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan nilai tambah2. Peningkatan daya saing pertanian	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hewan. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Pengolahan distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.2. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan
3	Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan impelementasi manajemen ASN2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja4. Transformasi pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Dari Tabel 3.2 nampak bahwa arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH mendukung dan sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Ada 4 arah kebijakan dengan 9 strategi Ditjen PKH sebagai landasan dalam pembangunan Tahun 2020-2024.

3.2. DUKUNGAN PETERNAKAN DAN KESWAN DALAM PENGARUSUTAMAAN DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL

3.2.1. Pengembangan Korporasi

Korporasi peternak dibangun melalui pemberdayaan peternak dengan mengkonsolidasikan peternak dalam suatu kelembagaan petani/peternak (kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi sebuah kelembagaan ekonomi. Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani/peternak karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan

Amanah RPJMN 2020-2024 menyatakan bahwa salah satu Proyek Nasional (*Major Project*) untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani/peternak, kegiatan ini akan dikembangkan di 1.029 klaster komoditas pertanian (termasuk peternak) dengan jumlah korporasi petani yang dikembangkan sebanyak 350 unit dan untuk peternakan ditargetkan sebanyak 100 unit. Inti dari pengembangan korporasi petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang mampu menciptakan unit usaha bisnis pertanian secara mandiri maupun bermitra dengan badan usaha lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Pengembangan korporasi peternak dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan diseconomic-externality yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan pada hakekatnya terdiri atas melakukan pemetaan, evaluasi potensi lahan dan sentra-sentra produksi peternakan. Pengembangan kawasan komoditas peternakan dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang

diantaranya menetapkan kawasan komoditas prioritas peternakan di seluruh kabupaten

3.3. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.3.1.Kerangka Regulasi

Aspek regulasi dimaksudkan sebagai kebutuhan regulasi yang harus diadakan selama kurun waktu 2020-2024. Kebutuhan ini dapat berupa penambahan regulasi ataupun penyederhanaan dan penghapusan untuk menjalankan penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Berdasarkan definisi diatas maka perencanaan regulasi dapat mempengaruhi implementasi arah kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan akhir organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi, berikut ini kerangka regulasi yang diperlukan untuk Ditjen PKH sebagai berikut:

Tabel 3.3 . Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi

Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi dan Urgensi kerangka regulasi		Keterangan
1. Rancangan Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Permentan No. 13/2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan dari beberapa regulasi
2	Permentan No. 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan	
3	Permentan No. 127/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
4	Permentan No. 51/2011 tentang Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak (semen beku/embrio, ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak)	
2. Rancangan Permentan tentang Pengawasan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Permentan No. 74/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan dari beberapa regulasi
2	Permentan No. 65/2008 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	
3	Permentan No. 42/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak	
4	Permentan No. 14/2008 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan	
5	Permentan No. 15/2008 tentang Monitoring dan Surveilans, Residu dan Cemaran Mikroba pada Hewan	
6	Permentan No. 45/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar	
7	Permentan No. 35/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif	



Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi dan Urgensi kerangka regulasi		Keterangan
3. Rancangan Permentan tentang Standar dan Sertifikasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Kepmentan No. 240/2003 tentang Cara Pembuatan Pakan yang Baik	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Kepmentan No. 446/1999 tentang Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik	
3	Permentan No. 114/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban	
4	Permentan No. 45 tahun 2007 tentang Klasifikasi Laboratorium	
5	Permentan No. 13/2010 tentang RPH Ruminansia dan Meat Cutting Plan	
6	Permentan No. 38/2015 tentang Tata Cara Produksi Kopi Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan	
7	Permentan No. 19/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih/Bibit Ternak dan SDGH	
8	Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran Pakan	
9	Kepmentan No. 695/1996 tentang Pendaftaran Obat Hewan jo. Kepmentan 455/2000 tentang Perubahan Obat Hewan	
4. Rancangan Permentan tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Kepmentan No. 4040/2002 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Peternakan	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Permentan No. 18/2009 tentang Izin Usaha Obat Hewan	
5. Rancangan Permentan tentang Nilai Tambah dan Daya Saing bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Penambahan substansi: pengolahan hasil peternakan, pemasaran hasil peternakan, kemitraan hasil peternakan, dan pengembangan usaha peternakan. Merupakan pengganti dari: Permentan No. 13/2017 tentang Kemitraan Hasil Peternakan	Penambahan substansi
6. Rancangan Permentan tentang Penyediaan dan Peredaran Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Penambahan substansi: penyediaan, peredaran ternak dan produk hewan; penyediaan dan peredaran obat hewan; penyediaan dan peredaran pakan; penyediaan dan peredaran susu	Penambahan substansi
7. Rancangan Permentan Program Kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Permentan Bekerja (Permentan No. 14/2019)	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Permentan No. 48 tahun 2016 tentang UPSUS SIWAB	
3	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	

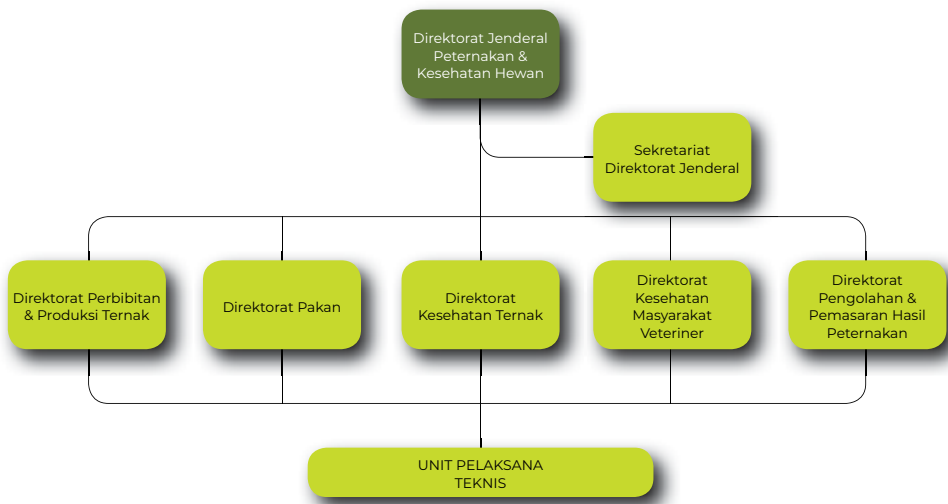
Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat 7 rancangan regulasi yang akan disederhanakan maupun penambahan substansi. Ketujuh regulasi tersebut dibuat untuk menyederhanakan 27 regulasi yang ada saat ini dalam rangka bagian dari penataan peraturan perundang-undangan dan adanya arahan Presiden.

3.3.2.Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujudnya reformasi birokrasi.

Organisasi Ditjen PKH sesuai dengan prinsip *Structure Follow The Stractegy* memerlukan kerangka kelembagaan yang menyesuaikan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tata laksana yang baik diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM termasuk didalamnya. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan desain organisasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir arah strategis Ditjen PKH tahun 2020 – 2024.

Gambar 3.2. Kerangka Kelembagaan Ditjen PKH



Dari Gambar 3.2 Ditjen PKH didukung oleh 6 unit kerja setingkat eselon II. Sebanyak 5 (lima) unit kerja menjalankan fungsi teknis, meliputi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; Direktorat Pakan; Direktorat Kesehatan Hewan; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Sementara fungsi manajerial diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Ditjen PKH juga dilengkapi dengan 22 UPT yang terdiri dari a) Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya; b) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan; c) Balai Besar Veteriner Wates; d) Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros; e) Balai Besar Veteriner Denpasar; f) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturaden; g) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari; h) Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang; i) Balai Embrio Ternak Cipelang; j) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor; k) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP); l) BVet Medan; m) BVet Bukittinggi; n) BVet Bandar Lampung; o) BVet Subang; p) BPTUHPT Indrapuri; q) BPTUHPT Siborongborong; r) BPTUHPT Padang Mangatas; s) BPTUHPT Sembawa; t) BPTUHPT Pelaihari; u) BPTUHPT Denpasar. Untuk mendukung cakupan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Indonesia Timur, telah mendapat persetujuan untuk membentuk Loka Papua yang telah mulai dibangun pada tahun 2019.

Penyederhanaan birokrasi disampaikan Presiden dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Untuk mengikuti kebijakan tersebut maka Pejabat fungsional akan menggantikan para pejabat struktural eselon III dan eselon IV dilingkup Ditjen PKH. Penempatan pejabat fungsional tersebut disesuaikan menurut keahlian yang dibutuhkan pada masing-masing unit Eselon II.



DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Mempertimbangkan kerangka kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, serta kerangka kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang telah ditetapkan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, disusunlah program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 – 2024, yaitu : “Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”, dengan sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak 4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada tahun 2020-2024, diperlukan penetapan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan pendanaan yang memadai untuk menjalankan kebijakan, strategi program dan kegiatan prioritas telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan arah kebijakan nasional, karena penentuan target kinerja telah mempertimbangkan adanya sumber dana baik dari APBN, APBD dan berbagai sumber dana lainnya.

4.1. TARGET KINERJA

Terdapat 11 indikator kinerja sasaran program yang menjadi barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diakhir periode 2020 – 2024. Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak



ukur capaian visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Target kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan hasil pendelegasian indikator kinerja Kementerian Pertanian.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, serta pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam sasaran program, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana secara tepat sasaran dan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan Ditjen PKH dapat berasal dari Pemerintah (APBN : RM, BLU, PNBK), dan sumber pendanaan lainnya yang berasal dari: Pemerintah Daerah (APBD), Swasta, BUMN/BUMD; investasi dalam negeri (PMDN), investasi dari luar negeri (PMA), Lembaga Keuangan dan Perbankan dan Swadaya Masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, proporsi APBN dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan pengungkit sumber pendanaan lainnya dalam mendukung target pembangunan nasional. Untuk sinergisme berbagai sumber pendanaan dalam kerangka pelaksanaan program sangat diperlukan. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 kerangka pendanaan tersebut disajikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Kegiatan	Alokasi (Milyar Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Produksi Pakan ternak	77.088	155.507	194.385	242.985	303.735
2	Pengendalian dan Penanggulang-an penyakit hewan	171.603	306.266	362.046	416.352	478.805
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	619.446	1.175.866	1.501.005	1.674.350	1.851.718
4	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	25.829	65.489	87.438	100.554	120.664
5	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30.369	76.816	92.947	102.242	112.466
6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	375.243	352.915	433.969	439.759	445.694
Total		1.299.578	2.132.854	2.671.790	2.976.424	3.313.082

Pada tabel 4.1 nampak bahwa dana untuk penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak memegang porsi yang cukup besar diantara kegiatan-kegiatan program lainnya di Ditjen PKH.

Alokasi pendanaan tahun 2020 sesuai dengan alokasi yanggg tertuang dalam DIPA, sedangkan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bersifat perkiraan kebutuhan dan akan disesuaikan dengan besaran alokasi dana yang diperoleh dan pilihan prioritas kegiatan dalam mendukung sasaran program serta evaluasi program pada tahun sebelumnya. Pendanaan ini baru bersifat untuk kegiatan-kegiatan penting penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, belum mempertimbangkan kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi selama 2020-2024 memerlukan perhitungan tersendiri karena banyak variabel yang harus dipertimbangkan.

Rencana Kerja Tahunan pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Lampiran 2.





DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan keswan 5 tahun mendatang dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 terkait Sub Sektor Peternakan dan Keswan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, strategi dan program sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab setiap unit kerja dalam mendukung kinerja pembangunan peternakan dan keswan.

Diharapkan dokumen Renstra ini, menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik di pusat maupun daerah sehingga terwujud suatu sinergi kegiatan antara pusat dan daerah. Sinergi horisontal dan vertikal, baik di lingkungan Ditjen PKH, dengan Eselon I lingkup Kementan, dan Pemangku Kepentingan lainnya (Pemda, Masyarakat dan Swasta) sangat diperlukan untuk mewujudkan visi : ***“Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern.*”**

Penyusunan Renstra telah disusun sesuai Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan apabila diperlukan adanya perubahan Renstra Ditjen Peternakan dan Keswan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.







DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI SAPI POTONG TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	416.463	432.163	449.613	468.977	490.443
2	Sumatera Utara	899.093	932.988	970.659	1.012.463	1.058.806
3	Sumatera Barat	418.375	434.148	451.677	471.130	492.695
4	Riau	203.301	210.965	219.484	228.936	239.415
5	Jambi	161.895	167.998	174.781	182.309	190.654
6	Sumatera Selatan	305.799	317.327	330.140	344.358	360.121
7	Bengkulu	165.312	171.544	178.470	186.157	194.678
8	Lampung	867.002	899.688	936.015	976.327	1.021.016
9	Kepulauan Bangka Belitung	15.793	16.388	17.050	17.784	18.598
10	Kepulauan Riau	27.462	28.498	29.648	30.925	32.341
11	DKI Jakarta	2.404	2.494	2.595	2.707	2.831
12	Jawa Barat	390.507	405.229	421.591	439.748	459.877
13	Jawa Tengah	1.806.474	1.874.577	1.950.267	2.034.260	2.127.374
14	DI. Yogyakarta	307.487	319.079	331.963	346.260	362.109
15	Jawa Timur	4.830.872	5.012.994	5.215.403	5.440.019	5.689.023
16	Banten	49.655	51.527	53.607	55.916	58.475
17	Bali	590.452	612.711	637.451	664.904	695.339
18	Nusa Tenggara Barat	1.288.795	1.337.382	1.391.382	1.451.305	1.517.736



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI POPULASI SAPI POTONG TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	1.192.820	1.237.788	1.287.766	1.343.228	1.404.711
20	Kalimantan Barat	156.453	162.352	168.907	176.181	184.246
21	Kalimantan Tengah	77.682	80.610	83.865	87.477	91.481
22	Kalimantan Selatan	131.569	136.529	142.042	148.159	154.941
23	Kalimantan Timur	123.466	128.121	133.294	139.035	145.399
24	Kalimantan Utara	23.872	24.772	25.772	26.882	28.112
25	Sulawesi Utara	129.069	133.935	139.343	145.344	151.997
26	Sulawesi Tengah	392.681	407.485	423.938	442.196	462.437
27	Sulawesi Selatan	1.436.153	1.490.296	1.550.469	1.617.245	1.691.270
28	Sulawesi Tenggara	358.239	371.744	386.754	403.410	421.876
29	Gorontalo	254.780	264.385	275.060	286.906	300.038
30	Sulawesi Barat	113.026	117.287	122.022	127.278	133.103
31	Maluku	110.418	114.581	119.207	124.341	130.033
32	Maluku Utara	107.286	111.331	115.826	120.814	126.344
33	Papua Barat	56.549	58.681	61.050	63.679	66.594
34	Papua	111.964	116.185	120.876	126.082	131.853
NASIONAL		17.523.168	18.183.783	18.917.988	19.732.745	20.635.965



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI SAPI PERAH TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	22	23	23	24	25
2	Sumatera Utara	5.755	5.880	6.022	6.182	6.360
3	Sumatera Barat	705	720	738	757	779
4	Riau	101	104	106	109	112
5	Jambi	27	28	29	29	30
6	Sumatera Selatan	58	59	60	62	64
7	Bengkulu	335	342	350	359	370
8	Lampung	1.034	1.057	1.082	1.111	1.143
9	Kepulauan Bangka Belitung	184	188	192	197	203
10	Kepulauan Riau	5	5	5	5	6
11	DKI Jakarta	2.053	2.097	2.148	2.205	2.268
12	Jawa Barat	119.884	122.492	125.446	128.767	132.481
13	Jawa Tengah	141.579	144.659	148.148	152.070	156.456
14	DI. Yogyakarta	3.587	3.665	3.753	3.853	3.964
15	Jawa Timur	299.315	305.826	313.201	321.493	330.767
16	Banten	63	64	66	68	69
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-



lanjutan
PROYEKSI POPULASI SAPI PERAH TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	33	34	35	36	37
20	Kalimantan Barat	37	37	38	39	40
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	198	202	207	212	219
23	Kalimantan Timur	93	95	98	100	103
24	Kalimantan Utara	2	2	2	2	2
25	Sulawesi Utara	71	73	74	76	78
26	Sulawesi Tengah	10	10	11	11	11
27	Sulawesi Selatan	1.081	1.105	1.131	1.161	1.195
28	Sulawesi Tenggara	44	45	46	47	48
29	Gorontalo	5	5	5	5	6
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	20	21	21	22	22
NASIONAL		576.301	588.838	603.038	619.004	636.859



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI KERBAU TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	86.644	87.572	88.719	90.091	91.700
2	Sumatera Utara	101.156	102.240	103.578	105.181	107.059
3	Sumatera Barat	82.958	83.846	84.944	86.258	87.799
4	Riau	26.731	27.017	27.371	27.794	28.291
5	Jambi	44.149	44.622	45.206	45.906	46.725
6	Sumatera Selatan	28.829	29.138	29.519	29.976	30.511
7	Bengkulu	30.755	31.085	31.492	31.979	32.550
8	Lampung	18.250	18.446	18.688	18.977	19.316
9	Kepulauan Bangka Belitung	351	355	360	365	372
10	Kepulauan Riau	8	8	8	8	8
11	DKI Jakarta	82	83	84	86	87
12	Jawa Barat	83.397	84.291	85.394	86.715	88.264
13	Jawa Tengah	59.324	59.960	60.745	61.685	62.787
14	DI. Yogyakarta	497	502	509	516	526
15	Jawa Timur	23.345	23.595	23.904	24.274	24.708
16	Banten	57.230	57.843	58.600	59.507	60.570
17	Bali	1.333	1.347	1.365	1.386	1.411
18	Nusa Tenggara Barat	121.900	123.206	124.819	126.751	129.014



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI POPULASI KERBAU TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
19	Nusa Tenggara Timur	184.282	186.257	188.695	195.037
20	Kalimantan Barat	2.022	2.043	2.070	2.140
21	Kalimantan Tengah	11.620	11.745	11.898	12.298
22	Kalimantan Selatan	24.173	24.432	24.751	25.583
23	Kalimantan Timur	6.068	6.133	6.213	6.422
24	Kalimantan Utara	3.683	3.723	3.771	3.898
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	2.822	2.852	2.889	2.987
27	Sulawesi Selatan	114.650	115.878	117.395	121.341
28	Sulawesi Tenggara	2.303	2.328	2.358	2.437
29	Gorontalo	22	23	23	24
30	Sulawesi Barat	8.621	8.713	8.827	9.124
31	Maluku	15.456	15.621	15.826	16.358
32	Maluku Utara	602	609	617	638
33	Papua Barat	-	-	-	-
34	Papua	757	765	775	801
NASIONAL		1.144.019	1.156.277	1.171.414	1.210.785



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI KAMBING TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	613.864	616.423	618.994	621.575	624.167
2	Sumatera Utara	841.021	844.528	848.049	851.586	855.137
3	Sumatera Barat	248.078	249.112	250.151	251.194	252.241
4	Riau	235.352	236.334	237.319	238.309	239.303
5	Jambi	386.226	387.836	389.453	391.077	392.708
6	Sumatera Selatan	403.652	405.335	407.025	408.722	410.427
7	Bengkulu	202.784	203.629	204.478	205.331	206.187
8	Lampung	1.437.230	1.443.223	1.449.241	1.455.284	1.461.353
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.885	8.922	8.960	8.997	9.035
10	Kepulauan Riau	21.934	22.025	22.117	22.209	22.302
11	DKI Jakarta	5.287	5.309	5.332	5.354	5.376
12	Jawa Barat	1.314.362	1.319.842	1.325.346	1.330.872	1.336.422
13	Jawa Tengah	3.942.393	3.958.832	3.975.340	3.991.916	4.008.562
14	DI. Yogyakarta	394.768	396.414	398.067	399.727	401.394
15	Jawa Timur	3.518.655	3.533.327	3.548.060	3.562.855	3.577.712
16	Banten	711.042	714.007	716.984	719.974	722.976
17	Bali	47.797	47.996	48.196	48.397	48.599
18	Nusa Tenggara Barat	697.811	700.721	703.642	706.576	709.523



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI POPULASI KAMBING TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
19	Nusa Tenggara Timur	970.608	974.655	978.719	982.800
20	Kalimantan Barat	145.749	146.357	146.967	147.580
21	Kalimantan Tengah	45.511	45.700	45.891	46.082
22	Kalimantan Selatan	74.698	75.009	75.322	75.636
23	Kalimantan Timur	67.892	68.175	68.459	68.745
24	Kalimantan Utara	13.588	13.645	13.702	13.759
25	Sulawesi Utara	54.261	54.487	54.714	54.943
26	Sulawesi Tengah	542.231	544.492	546.762	549.042
27	Sulawesi Selatan	777.593	780.835	784.091	787.361
28	Sulawesi Tenggara	189.878	190.670	191.465	192.263
29	Gorontalo	100.754	101.174	101.596	102.020
30	Sulawesi Barat	195.204	196.018	196.835	197.656
31	Maluku	100.636	101.055	101.477	101.900
32	Maluku Utara	143.605	144.204	144.805	145.409
33	Papua Barat	17.986	18.061	18.137	18.212
34	Papua	68.769	69.055	69.343	69.633
NASIONAL		18.540.103	18.617.411	18.695.042	18.772.997
					18.851.277



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI DOMBA TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	101.053	103.268	105.532	107.845	110.209
2	Sumatera Utara	756.601	773.186	790.134	807.454	825.154
3	Sumatera Barat	5.678	5.802	5.930	6.060	6.192
4	Riau	29.759	30.411	31.078	31.759	32.455
5	Jambi	81.121	82.899	84.716	86.573	88.471
6	Sumatera Selatan	36.638	37.441	38.262	39.100	39.957
7	Bengkulu	9.505	9.713	9.926	10.143	10.366
8	Lampung	82.317	84.121	85.965	87.849	89.775
9	Kepulauan Bangka Belitung	127	130	133	136	139
10	Kepulauan Riau	8	8	9	9	9
11	DKI Jakarta	1.510	1.543	1.577	1.611	1.647
12	Jawa Barat	12.587.078	12.862.990	13.144.949	13.433.090	13.727.546
13	Jawa Tengah	2.468.643	2.522.757	2.578.056	2.634.568	2.692.318
14	DI. Yogyakarta	150.428	153.726	157.095	160.539	164.058
15	Jawa Timur	1.453.298	1.485.154	1.517.709	1.550.978	1.584.975
16	Banten	331.086	338.344	345.760	353.339	361.085
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	23.729	24.249	24.781	25.324	25.879

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI POPULASI DOMBA TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	78.494	80.215	81.973	83.770	85.606
20	Kalimantan Barat	161	165	168	172	176
21	Kalimantan Tengah	554	566	578	591	604
22	Kalimantan Selatan	1.762	1.801	1.840	1.880	1.922
23	Kalimantan Timur	611	625	638	652	667
24	Kalimantan Utara	35	36	36	37	38
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	11.857	12.117	12.383	12.654	12.932
27	Sulawesi Selatan	865	884	903	923	943
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	11.573	11.827	12.086	12.351	12.622
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	160	164	167	171	174
NASIONAL		18.224.651	18.624.140	19.032.385	19.449.580	19.875.919



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI BABI TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2.479	2.555	2.633	2.713	2.796
2	Sumatera Utara	980.301	1.010.185	1.040.980	1.072.714	1.105.416
3	Sumatera Barat	24.751	25.505	26.283	27.084	27.910
4	Riau	50.509	52.048	53.635	55.270	56.955
5	Jambi	1.246	1.284	1.323	1.363	1.405
6	Sumatera Selatan	15.134	15.595	16.070	16.560	17.065
7	Bengkulu	1.505	1.551	1.599	1.647	1.698
8	Lampung	45.149	46.525	47.944	49.405	50.911
9	Kepulauan Bangka Belitung	20.251	20.868	21.505	22.160	22.836
10	Kepulauan Riau	276.707	285.142	293.835	302.792	312.023
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	7.474	7.702	7.936	8.178	8.428
13	Jawa Tengah	128.214	132.123	136.151	140.301	144.578
14	DI. Yogyakarta	13.806	14.227	14.661	15.108	15.568
15	Jawa Timur	57.052	58.791	60.583	62.430	64.334
16	Banten	6.510	6.708	6.913	7.123	7.340
17	Bali	688.417	709.404	731.030	753.315	776.280
18	Nusa Tenggara Barat	64.164	66.120	68.135	70.213	72.353



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI POPULASI BABI TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	2.608.908	2.688.440	2.770.396	2.854.851	2.941.881
20	Kalimantan Barat	455.195	469.071	483.371	498.106	513.291
21	Kalimantan Tengah	224.950	231.808	238.875	246.157	253.661
22	Kalimantan Selatan	5.137	5.293	5.455	5.621	5.792
23	Kalimantan Timur	82.311	84.820	87.406	90.071	92.816
24	Kalimantan Utara	28.453	29.320	30.214	31.135	32.084
25	Sulawesi Utara	389.015	400.874	413.095	425.688	438.665
26	Sulawesi Tengah	258.920	266.813	274.947	283.328	291.965
27	Sulawesi Selatan	849.715	875.619	902.312	929.819	958.164
28	Sulawesi Tenggara	96.617	99.562	102.597	105.725	108.948
29	Gorontalo	10.658	10.983	11.318	11.663	12.018
30	Sulawesi Barat	165.206	170.242	175.432	180.780	186.291
31	Maluku	81.602	84.090	86.654	89.295	92.017
32	Maluku Utara	90.492	93.250	96.093	99.022	102.041
33	Papua Barat	86.770	89.415	92.141	94.950	97.845
34	Papua	963.088	992.448	1.022.703	1.053.879	1.086.007
NASIONAL		8.780.706	9.048.385	9.324.223	9.608.470	9.901.382



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI AYAM BURAS TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	4.704.735	4.824.712	4.947.749	5.073.923	5.203.314
2	Sumatera Utara	15.020.721	15.403.769	15.796.585	16.199.418	16.612.525
3	Sumatera Barat	4.346.792	4.457.641	4.571.316	4.687.891	4.807.438
4	Riau	7.057.980	7.237.967	7.422.545	7.611.829	7.805.941
5	Jambi	11.238.177	11.524.765	11.818.662	12.120.053	12.429.130
6	Sumatera Selatan	10.557.768	10.827.005	11.103.108	11.386.251	11.676.616
7	Bengkulu	4.240.579	4.348.719	4.459.617	4.573.343	4.689.969
8	Lampung	13.680.556	14.029.428	14.387.196	14.754.089	15.130.337
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.155.562	1.185.030	1.215.250	1.246.240	1.278.021
10	Kepulauan Riau	987.379	1.012.558	1.038.380	1.064.860	1.092.015
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	27.092.241	27.783.128	28.491.635	29.218.209	29.963.311
13	Jawa Tengah	42.890.066	43.983.819	45.105.464	46.255.712	47.435.293
14	DI. Yogyakarta	3.673.476	3.767.155	3.863.222	3.961.739	4.062.769
15	Jawa Timur	40.501.034	41.533.863	42.593.031	43.679.209	44.793.086
16	Banten	8.472.009	8.688.057	8.909.613	9.136.820	9.369.821
17	Bali	2.948.041	3.023.220	3.100.316	3.179.379	3.260.457
18	Nusa Tenggara Barat	64.164	66.120	68.135	70.213	72.353

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI POPULASI AYAM BURAS TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
19	Nusa Tenggara Timur	12.211.633	12.523.046	12.842.400	13.169.898
20	Kalimantan Barat	5.867.007	6.016.623	6.170.055	6.327.400
21	Kalimantan Tengah	2.945.394	3.020.506	3.097.532	3.176.523
22	Kalimantan Selatan	10.607.458	10.877.962	11.155.365	11.439.841
23	Kalimantan Timur	4.605.616	4.723.066	4.843.510	4.967.026
24	Kalimantan Utara	1.189.344	1.219.674	1.250.778	1.282.674
25	Sulawesi Utara	2.579.379	2.645.157	2.712.612	2.781.787
26	Sulawesi Tengah	4.968.100	5.094.793	5.224.717	5.357.954
27	Sulawesi Selatan	31.038.050	31.829.561	32.641.257	33.473.651
28	Sulawesi Tenggara	11.179.368	11.464.456	11.756.815	12.056.629
29	Gorontalo	2.300.583	2.359.251	2.419.414	2.481.113
30	Sulawesi Barat	5.463.355	5.602.678	5.745.553	5.892.072
31	Maluku	2.485.707	2.549.096	2.614.101	2.680.764
32	Maluku Utara	750.318	769.452	789.074	809.196
33	Papua Barat	1.501.487	1.539.777	1.579.043	1.619.311
34	Papua	2.577.261	2.642.984	2.710.384	2.779.502
NASIONAL		309.456.696	317.348.246	325.441.042	333.740.214
					342.251.026



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	697.108	710.890	724.944	739.276	753.891
2	Sumatera Utara	29.013.785	29.587.375	30.172.305	30.768.798	31.377.084
3	Sumatera Barat	16.087.641	16.405.686	16.730.020	17.060.765	17.398.049
4	Riau	692.123	705.806	719.759	733.989	748.499
5	Jambi	1.285.389	1.310.800	1.336.714	1.363.141	1.390.089
6	Sumatera Selatan	7.745.964	7.899.099	8.055.261	8.214.510	8.376.907
7	Bengkulu	613.852	625.988	638.363	650.983	663.853
8	Lampung	7.407.247	7.553.685	7.703.018	7.855.303	8.010.599
9	Kepulauan Bangka Belitung	599.023	610.865	622.942	635.257	647.816
10	Kepulauan Riau	791.950	807.607	823.573	839.854	856.458
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	26.547.440	27.072.272	27.607.479	28.153.267	28.709.845
13	Jawa Tengah	28.289.042	28.848.304	29.418.623	30.000.216	30.593.308
14	DI. Yogyakarta	3.558.287	3.628.633	3.700.369	3.773.524	3.848.125
15	Jawa Timur	92.431.396	94.258.725	96.122.180	98.022.474	99.960.337
16	Banten	11.571.721	11.800.489	12.033.780	12.271.683	12.514.289
17	Bali	10.548.866	10.757.412	10.970.082	11.186.955	11.408.117
18	Nusa Tenggara Barat	1.922.051	1.960.049	1.998.798	2.038.314	2.078.610



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

lanjutan

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
19	Nusa Tenggara Timur	520.165	530.448	540.935	551.629
20	Kalimantan Barat	6.534.063	6.663.239	6.794.968	6.929.302
21	Kalimantan Tengah	418.463	426.736	435.172	443.776
22	Kalimantan Selatan	4.913.284	5.010.417	5.109.471	5.210.483
23	Kalimantan Timur	1.888.063	1.925.389	1.963.453	2.002.270
24	Kalimantan Utara	34.371	35.050	35.743	36.450
25	Sulawesi Utara	1.505.399	1.535.160	1.565.510	1.596.459
26	Sulawesi Tengah	783.320	798.806	814.598	830.702
27	Sulawesi Selatan	10.830.619	11.044.736	11.263.086	11.485.752
28	Sulawesi Tenggara	160.331	163.501	166.733	170.030
29	Gorontalo	216.239	220.514	224.874	229.319
30	Sulawesi Barat	330.984	337.527	344.200	351.005
31	Maluku	35.058	35.751	36.458	37.179
32	Maluku Utara	5.005	5.104	5.205	5.308
33	Papua Barat	465.735	474.943	484.332	493.907
34	Papua	691.565	705.237	719.179	733.397
NASIONAL		269.135.550	274.456.245	279.882.128	285.415.278
					291.057.816



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
1	Aceh	33.328.203	33.469.847	33.754.341	34.330.604
2	Sumatera Utara	137.486.712	138.071.031	139.244.635	141.621.854
3	Sumatera Barat	57.893.566	58.139.614	58.633.800	59.634.811
4	Riau	96.875.647	97.287.369	98.114.311	99.789.343
5	Jambi	36.469.541	36.624.537	36.935.845	37.249.800
6	Sumatera Selatan	86.931.740	87.301.199	88.043.260	89.546.356
7	Bengkulu	8.607.301	8.643.882	8.717.355	8.866.180
8	Lampung	90.487.552	90.872.125	91.644.538	93.209.116
9	Kepulauan Bangka Belitung	19.906.757	19.991.361	20.161.287	20.505.486
10	Kepulauan Riau	23.849.257	23.950.616	24.154.197	24.566.563
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	811.146.443	814.593.815	821.517.863	835.543.021
13	Jawa Tengah	617.968.231	620.594.596	625.869.650	636.554.653
14	DI. Yogyakarta	51.245.533	51.463.327	51.900.765	52.786.828
15	Jawa Timur	459.570.078	461.523.251	465.446.199	473.392.412
16	Banten	200.741.443	201.594.594	203.308.148	206.779.075
17	Bali	77.479.777	77.809.066	78.470.443	79.810.110
18	Nusa Tenggara Barat	30.717.312	30.847.860	31.110.067	31.641.186

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
19	Nusa Tenggara Timur	18.870.166	18.950.364	19.111.442	19.437.718
20	Kalimantan Barat	53.568.878	53.796.545	54.253.816	54.714.973
21	Kalimantan Tengah	21.968.804	22.062.171	22.249.699	22.438.822
22	Kalimantan Selatan	78.105.752	78.437.701	79.104.422	79.776.809
23	Kalimantan Timur	42.404.256	42.584.474	42.946.442	43.311.487
24	Kalimantan Utara	4.681.629	4.701.526	4.741.489	4.781.792
25	Sulawesi Utara	9.811.979	9.853.680	9.937.436	10.021.904
26	Sulawesi Tengah	5.520.201	5.543.662	5.590.783	5.638.305
27	Sulawesi Selatan	76.337.385	76.661.819	77.313.445	77.970.609
28	Sulawesi Tenggara	3.794.969	3.811.097	3.843.492	3.876.161
29	Gorontalo	3.399.518	3.413.966	3.442.985	3.472.250
30	Sulawesi Barat	2.401.068	2.411.272	2.431.768	2.452.438
31	Maluku	676.803	679.680	685.457	691.283
32	Maluku Utara	126.469	127.007	128.086	129.175
33	Papua Barat	1.001.002	1.005.256	1.013.801	1.022.418
34	Papua	6.431.156	6.458.489	6.513.386	6.568.750
NASIONAL		3.169.805.127	3.183.276.799	3.210.334.652	3.237.622.496
					3.265.142.287



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI POPULASI ITIK TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2.077.821	2.136.054	2.195.919	2.257.461	2.320.728
2	Sumatera Utara	2.492.845	2.562.709	2.634.531	2.708.366	2.784.271
3	Sumatera Barat	1.190.976	1.224.354	1.258.668	1.293.943	1.330.207
4	Riau	235.075	241.664	248.436	255.399	262.557
5	Jambi	900.585	925.824	951.771	978.445	1.005.867
6	Sumatera Selatan	2.096.683	2.155.444	2.215.852	2.277.953	2.341.795
7	Bengkulu	170.016	174.781	179.680	184.715	189.892
8	Lampung	924.154	950.054	976.680	1.004.053	1.032.192
9	Kepulauan Bangka Belitung	101.837	104.691	107.626	110.642	113.743
10	Kepulauan Riau	37.131	38.172	39.242	40.341	41.472
11	DKI Jakarta	8.789	9.035	9.288	9.548	9.816
12	Jawa Barat	8.408.572	8.644.230	8.886.491	9.135.542	9.391.573
13	Jawa Tengah	5.491.420	5.645.322	5.803.536	5.966.185	6.133.392
14	DI. Yogyakarta	418.082	429.799	441.845	454.228	466.958
15	Jawa Timur	6.474.032	6.655.473	6.841.998	7.033.750	7.230.877
16	Banten	1.973.247	2.028.549	2.085.401	2.143.846	2.203.929
17	Bali	551.369	566.822	582.707	599.038	615.827
18	Nusa Tenggara Barat	1.211.446	1.245.398	1.280.301	1.316.183	1.353.070



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI POPULASI ITIK TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	255.864	263.035	270.406	277.985	285.775
20	Kalimantan Barat	574.725	590.832	607.391	624.413	641.913
21	Kalimantan Tengah	292.223	300.413	308.833	317.488	326.386
22	Kalimantan Selatan	4.861.728	4.997.982	5.138.054	5.282.052	5.430.086
23	Kalimantan Timur	270.361	277.938	285.727	293.735	301.967
24	Kalimantan Utara	25.837	26.561	27.306	28.071	28.858
25	Sulawesi Utara	166.267	170.926	175.717	180.641	185.704
26	Sulawesi Tengah	1.351.158	1.389.025	1.427.953	1.467.973	1.509.114
27	Sulawesi Selatan	5.074.435	5.216.650	5.362.851	5.513.149	5.667.660
28	Sulawesi Tenggara	582.533	598.859	615.643	632.896	650.634
29	Gorontalo	67.523	69.415	71.361	73.361	75.417
30	Sulawesi Barat	338.262	347.742	357.487	367.506	377.806
31	Maluku	233.825	240.378	247.115	254.040	261.160
32	Maluku Utara	78.939	81.151	83.426	85.764	88.168
33	Papua Barat	92.712	95.310	97.982	100.728	103.551
34	Papua	91.765	94.337	96.980	99.698	102.492
NASIONAL		49.122.238	50.498.929	51.914.203	53.369.141	54.864.855



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI DAGING SAPI POTONG (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	8.051	8.401	8.778	9.196	9.658
2	Sumatera Utara	10.922	11.396	11.908	12.474	13.102
3	Sumatera Barat	16.508	17.225	17.998	18.855	19.803
4	Riau	6.455	6.735	7.038	7.373	7.743
5	Jambi	3.819	3.985	4.163	4.362	4.581
6	Sumatera Selatan	8.707	9.085	9.493	9.945	10.445
7	Bengkulu	2.361	2.463	2.574	2.696	2.832
8	Lampung	10.136	10.577	11.051	11.577	12.160
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.260	2.358	2.464	2.582	2.712
10	Kepulauan Riau	1.050	1.096	1.145	1.199	1.260
11	DKI Jakarta	14.388	15.013	15.687	16.434	17.261
12	Jawa Barat	62.178	64.879	67.792	71.018	74.591
13	Jawa Tengah	48.091	50.180	52.432	54.928	57.691
14	DI. Yogyakarta	5.501	5.740	5.997	6.283	6.599
15	Jawa Timur	79.364	82.812	86.529	90.647	95.208
16	Banten	31.030	32.377	33.831	35.441	37.224
17	Bali	6.808	7.103	7.422	7.775	8.166
18	Nusa Tenggara Barat	8.217	8.574	8.959	9.385	9.857



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI DAGING SAPI POTONG (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
19	Nusa Tenggara Timur	9.832	10.259	10.720	11.795
20	Kalimantan Barat	4.051	4.227	4.417	4.860
21	Kalimantan Tengah	2.887	3.012	3.148	3.463
22	Kalimantan Selatan	4.841	5.051	5.278	5.807
23	Kalimantan Timur	5.614	5.858	6.121	6.735
24	Kalimantan Utara	443	462	483	531
25	Sulawesi Utara	2.612	2.725	2.848	3.133
26	Sulawesi Tengah	3.756	3.919	4.095	4.506
27	Sulawesi Selatan	13.631	14.223	14.862	16.352
28	Sulawesi Tenggara	3.302	3.446	3.600	3.961
29	Gorontalo	1.443	1.505	1.573	1.731
30	Sulawesi Barat	1.630	1.701	1.777	1.956
31	Maluku	1.644	1.715	1.792	1.972
32	Maluku Utara	645	673	703	773
33	Papua Barat	1.476	1.541	1.610	1.771
34	Papua	2.869	2.993	3.128	3.441
NASIONAL		386.519	403.309	421.414	463.680



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI DAGING KERBAU (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2.320	2.364	2.413	2.469	2.533
2	Sumatera Utara	1.591	1.621	1.655	1.693	1.737
3	Sumatera Barat	1.971	2.009	2.051	2.098	2.152
4	Riau	1.542	1.572	1.604	1.642	1.684
5	Jambi	1.640	1.671	1.706	1.745	1.790
6	Sumatera Selatan	617	629	642	657	674
7	Bengkulu	261	266	272	278	285
8	Lampung	98	100	102	105	107
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	48	49	50	52	53
12	Jawa Barat	1.389	1.415	1.445	1.478	1.516
13	Jawa Tengah	1.533	1.562	1.595	1.632	1.674
14	DI. Yogyakarta	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	77	79	80	82	84
16	Banten	2.703	2.754	2.812	2.877	2.951
17	Bali	14	15	15	15	16
18	Nusa Tenggara Barat	1.061	1.081	1.104	1.129	1.158



lanjutan

PROYEKSI DAGING KERBAU (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
19	Nusa Tenggara Timur	1.572	1.602	1.635	1.716
20	Kalimantan Barat	39	40	41	43
21	Kalimantan Tengah	77	78	80	84
22	Kalimantan Selatan	523	533	544	571
23	Kalimantan Timur	58	59	60	63
24	Kalimantan Utara	7	7	7	7
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	27	28	28	30
27	Sulawesi Selatan	2.841	2.895	2.955	3.101
28	Sulawesi Tenggara	16	16	16	17
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	150	153	156	164
31	Maluku	42	43	44	46
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
34	Papua	27	28	28	30
NASIONAL		22.246	22.671	23.143	24.287



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI DAGING KAMBING (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1.628	1.645	1.663	1.680	1.698
2	Sumatera Utara	849	858	867	877	886
3	Sumatera Barat	524	530	535	541	547
4	Riau	505	510	515	521	526
5	Jambi	816	825	834	843	852
6	Sumatera Selatan	1.214	1.227	1.240	1.253	1.266
7	Bengkulu	82	83	84	85	85
8	Lampung	1.374	1.389	1.403	1.418	1.433
9	Kepulauan Bangka Belitung	55	55	56	56	57
10	Kepulauan Riau	338	341	345	348	352
11	DKI Jakarta	602	608	615	621	628
12	Jawa Barat	3.186	3.220	3.254	3.289	3.324
13	Jawa Tengah	8.712	8.804	8.898	8.992	9.087
14	DI. Yogyakarta	1.266	1.279	1.293	1.306	1.320
15	Jawa Timur	18.597	18.794	18.994	19.195	19.398
16	Banten	3.099	3.131	3.165	3.198	3.232
17	Bali	709	717	724	732	740
18	Nusa Tenggara Barat	231	233	236	238	241



lanjutan

PROYEKSI DAGING KAMBING (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	2.090	2.112	2.135	2.157	2.180
20	Kalimantan Barat	301	305	308	311	314
21	Kalimantan Tengah	159	161	163	164	166
22	Kalimantan Selatan	194	196	198	200	202
23	Kalimantan Timur	410	414	418	423	427
24	Kalimantan Utara	72	73	74	75	76
25	Sulawesi Utara	94	95	96	97	98
26	Sulawesi Tengah	1.008	1.019	1.029	1.040	1.051
27	Sulawesi Selatan	817	826	835	844	853
28	Sulawesi Tenggara	224	227	229	232	234
29	Gorontalo	164	166	168	169	171
30	Sulawesi Barat	132	133	135	136	138
31	Maluku	168	170	171	173	175
32	Maluku Utara	56	56	57	58	58
33	Papua Barat	53	53	54	55	55
34	Papua	210	212	214	217	219
NASIONAL		49.940	50.469	51.004	51.545	52.091



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI DAGING DOMBA (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	278	281	284	287	290
2	Sumatera Utara	459	464	469	474	479
3	Sumatera Barat	27	27	27	28	28
4	Riau	20	21	21	21	21
5	Jambi	101	102	103	104	105
6	Sumatera Selatan	122	123	125	126	127
7	Bengkulu	10	10	11	11	11
8	Lampung	41	41	42	42	43
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	26	26	26	26	27
12	Jawa Barat	32.493	32.847	33.205	33.567	33.933
13	Jawa Tengah	4.637	4.687	4.739	4.790	4.842
14	DI. Yogyakarta	1.983	2.005	2.027	2.049	2.071
15	Jawa Timur	5.644	5.705	5.768	5.830	5.894
16	Banten	2.513	2.540	2.568	2.596	2.624
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0



lanjutan

PROYEKSI DAGING DOMBA (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	47	48	48	49	49
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
22	Kalimantan Selatan	2	2	2	2	2
23	Kalimantan Timur	2	2	2	2	2
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	8	8	8	8	8
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	24	24	24	25	25
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
NASIONAL		48.438	48.966	49.500	50.039	50.585



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI DAGING BABI (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	42	43	43	43	44
2	Sumatera Utara	27.026	27.310	27.596	27.886	28.179
3	Sumatera Barat	200	202	204	206	208
4	Riau	994	1.005	1.015	1.026	1.037
5	Jambi	134	135	136	138	139
6	Sumatera Selatan	211	213	216	218	220
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	574	580	586	592	598
9	Kepulauan Bangka Belitung	492	497	502	508	513
10	Kepulauan Riau	2.244	2.267	2.291	2.315	2.340
11	DKI Jakarta	3.558	3.596	3.633	3.672	3.710
12	Jawa Barat	746	754	762	770	778
13	Jawa Tengah	865	875	884	893	902
14	DI. Yogyakarta	180	182	184	186	188
15	Jawa Timur	2.280	2.304	2.328	2.353	2.377
16	Banten	2.719	2.747	2.776	2.805	2.835
17	Bali	48.402	48.910	49.424	49.943	50.467
18	Nusa Tenggara Barat	63	64	65	65	66



lanjutan
PROYEKSI DAGING BABI (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	31.366	31.695	32.028	32.364	32.704
20	Kalimantan Barat	7.659	7.739	7.821	7.903	7.986
21	Kalimantan Tengah	1.228	1.241	1.254	1.267	1.281
22	Kalimantan Selatan	33	33	33	34	34
23	Kalimantan Timur	885	894	903	913	922
24	Kalimantan Utara	150	151	153	154	156
25	Sulawesi Utara	15.642	15.806	15.972	16.139	16.309
26	Sulawesi Tengah	1.252	1.266	1.279	1.292	1.306
27	Sulawesi Selatan	3.432	3.468	3.504	3.541	3.578
28	Sulawesi Tenggara	610	616	623	629	636
29	Gorontalo	16	16	16	17	17
30	Sulawesi Barat	439	444	449	453	458
31	Maluku	477	482	487	492	497
32	Maluku Utara	232	234	237	239	242
33	Papua Barat	783	791	800	808	817
34	Papua	6.157	6.222	6.287	6.353	6.420
NASIONAL		161.090	162.782	164.491	166.218	167.963



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI DAGING AYAM BURAS (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024 (Ribu Ton)						
No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	5.586	5.639	5.693	5.747	5.801
2	Sumatera Utara	17.973	18.143	18.316	18.490	18.665
3	Sumatera Barat	5.345	5.395	5.447	5.498	5.551
4	Riau	3.134	3.164	3.194	3.224	3.255
5	Jambi	7.640	7.713	7.786	7.860	7.934
6	Sumatera Selatan	4.382	4.424	4.466	4.508	4.551
7	Bengkulu	4.587	4.631	4.675	4.719	4.764
8	Lampung	13.313	13.440	13.567	13.696	13.826
9	Kepulauan Bangka Belitung	559	564	569	575	580
10	Kepulauan Riau	1.068	1.078	1.089	1.099	1.109
11	DKI Jakarta	1.422	1.435	1.449	1.462	1.476
12	Jawa Barat	27.123	27.381	27.641	27.904	28.169
13	Jawa Tengah	34.430	34.757	35.087	35.421	35.757
14	DI. Yogyakarta	5.352	5.403	5.455	5.506	5.559
15	Jawa Timur	50.902	51.385	51.873	52.366	52.864
16	Banten	4.150	4.190	4.230	4.270	4.310
17	Bali	3.335	3.367	3.399	3.431	3.464
18	Nusa Tenggara Barat	11.718	11.830	11.942	12.056	12.170

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan

PROYEKSI DAGING AYAM BURAS (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	11.889	12.002	12.116	12.232	12.348
20	Kalimantan Barat	3.229	3.259	3.290	3.322	3.353
21	Kalimantan Tengah	2.250	2.272	2.293	2.315	2.337
22	Kalimantan Selatan	2.822	2.849	2.876	2.903	2.931
23	Kalimantan Timur	5.109	5.158	5.207	5.256	5.306
24	Kalimantan Utara	1.319	1.332	1.345	1.357	1.370
25	Sulawesi Utara	2.790	2.817	2.844	2.871	2.898
26	Sulawesi Tengah	8.597	8.679	8.761	8.844	8.928
27	Sulawesi Selatan	26.636	26.889	27.144	27.402	27.662
28	Sulawesi Tenggara	12.094	12.209	12.325	12.442	12.560
29	Gorontalo	2.489	2.512	2.536	2.560	2.585
30	Sulawesi Barat	5.910	5.966	6.023	6.080	6.138
31	Maluku	269	271	274	277	279
32	Maluku Utara	1.124	1.135	1.146	1.157	1.168
33	Papua Barat	1.624	1.640	1.655	1.671	1.687
34	Papua	4.933	4.980	5.028	5.075	5.124
NASIONAL		295.106	297.910	300.740	303.597	306.481



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI DAGING AYAM RAS (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	36.748	36.905	37.218	37.535	37.854
2	Sumatera Utara	151.596	152.240	153.534	154.839	156.155
3	Sumatera Barat	63.835	64.106	64.651	65.200	65.755
4	Riau	106.817	107.271	108.183	109.102	110.030
5	Jambi	40.212	40.383	40.726	41.072	41.421
6	Sumatera Selatan	95.853	96.260	97.078	97.903	98.736
7	Bengkulu	9.491	9.531	9.612	9.694	9.776
8	Lampung	99.773	100.197	101.049	101.908	102.774
9	Kepulauan Bangka Belitung	21.950	22.043	22.230	22.419	22.610
10	Kepulauan Riau	26.297	26.408	26.633	26.859	27.088
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	894.386	898.187	905.822	913.522	921.286
13	Jawa Tengah	681.384	684.280	690.096	695.962	701.878
14	DI. Yogyakarta	56.504	56.744	57.227	57.713	58.204
15	Jawa Timur	506.731	508.885	513.210	517.573	521.972
16	Banten	221.342	222.282	224.172	226.077	227.999
17	Bali	85.431	85.794	86.523	87.259	88.000
18	Nusa Tenggara Barat	33.870	34.013	34.303	34.594	34.888

Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan

PROYEKSI DAGING AYAM RAS (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024

(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	20.807	20.895	21.073	21.252	21.432
20	Kalimantan Barat	59.066	59.317	59.821	60.330	60.843
21	Kalimantan Tengah	24.223	24.326	24.533	24.741	24.952
22	Kalimantan Selatan	86.121	86.487	87.222	87.964	88.711
23	Kalimantan Timur	46.756	46.954	47.354	47.756	48.162
24	Kalimantan Utara	5.162	5.184	5.228	5.272	5.317
25	Sulawesi Utara	10.819	10.865	10.957	11.050	11.144
26	Sulawesi Tengah	6.087	6.113	6.165	6.217	6.270
27	Sulawesi Selatan	84.171	84.529	85.247	85.972	86.703
28	Sulawesi Tenggara	4.184	4.202	4.238	4.274	4.310
29	Gorontalo	3.748	3.764	3.796	3.829	3.861
30	Sulawesi Barat	2.647	2.659	2.681	2.704	2.727
31	Maluku	746	749	756	762	769
32	Maluku Utara	139	140	141	142	144
33	Papua Barat	1.104	1.108	1.118	1.127	1.137
34	Papua	7.091	7.121	7.182	7.243	7.304
NASIONAL		3.495.091	3.509.945	3.539.779	3.569.867	3.600.211

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI DAGING ITIK (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024 <small>(Ribu Ton)</small>						
No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1.431	1.445	1.460	1.474	1.489
2	Sumatera Utara	2.274	2.297	2.320	2.343	2.366
3	Sumatera Barat	742	749	757	765	772
4	Riau	244	247	249	251	254
5	Jambi	568	574	580	586	591
6	Sumatera Selatan	2.522	2.547	2.573	2.598	2.624
7	Bengkulu	48	49	49	50	50
8	Lampung	721	728	736	743	751
9	Kepulauan Bangka Belitung	63	64	65	65	66
10	Kepulauan Riau	25	25	25	25	26
11	DKI Jakarta	1.172	1.184	1.195	1.207	1.219
12	Jawa Barat	6.695	6.762	6.830	6.898	6.967
13	Jawa Tengah	4.528	4.574	4.619	4.666	4.712
14	DI. Yogyakarta	416	421	425	429	433
15	Jawa Timur	9.049	9.139	9.230	9.323	9.416
16	Banten	1.286	1.299	1.312	1.325	1.338
17	Bali	318	321	325	328	331
18	Nusa Tenggara Barat	1.252	1.264	1.277	1.290	1.303

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan PROYEKSI DAGING ITIK (MEAT YIELD) TAHUN 2020-2024 (Ribu Ton)						
No.	Provinsi	Tahun				2024
		2020	2021	2022	2023	
19	Nusa Tenggara Timur	170	172	173	175	177
20	Kalimantan Barat	307	310	313	316	319
21	Kalimantan Tengah	170	172	173	175	177
22	Kalimantan Selatan	1.759	1.776	1.794	1.812	1.830
23	Kalimantan Timur	118	119	121	122	123
24	Kalimantan Utara	11	11	12	12	12
25	Sulawesi Utara	110	112	113	114	115
26	Sulawesi Tengah	898	907	916	925	934
27	Sulawesi Selatan	2.414	2.438	2.463	2.487	2.512
28	Sulawesi Tenggara	387	391	395	399	403
29	Gorontalo	45	45	46	46	47
30	Sulawesi Barat	225	227	229	232	234
31	Maluku	52	52	53	53	54
32	Maluku Utara	64	65	65	66	67
33	Papua Barat	62	62	63	63	64
34	Papua	61	62	62	63	63
NASIONAL		40.207	40.609	41.015	41.425	41.839

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI TELUR AYAM BURAS TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	6.506	6.748	6.999	7.259	7.529
2	Sumatera Utara	12.475	12.938	13.419	13.918	14.436
3	Sumatera Barat	2.822	2.927	3.035	3.148	3.265
4	Riau	14.559	15.100	15.662	16.244	16.848
5	Jambi	6.224	6.456	6.696	6.945	7.203
6	Sumatera Selatan	9.461	9.813	10.178	10.556	10.949
7	Bengkulu	2.796	2.900	3.008	3.120	3.236
8	Lampung	9.002	9.337	9.684	10.044	10.417
9	Kepulauan Bangka Belitung	788	817	848	879	912
10	Kepulauan Riau	651	675	700	726	753
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	47.063	48.813	50.628	52.510	54.462
13	Jawa Tengah	35.760	37.090	38.469	39.899	41.382
14	DI. Yogyakarta	2.385	2.473	2.565	2.661	2.759
15	Jawa Timur	22.261	23.088	23.947	24.837	25.760
16	Banten	11.485	11.912	12.355	12.815	13.291
17	Bali	1.134	1.176	1.220	1.265	1.312
18	Nusa Tenggara Barat	3.679	3.816	3.958	4.105	4.257

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI TELUR AYAM BURAS TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	5.282	5.478	5.682	5.893	6.112
20	Kalimantan Barat	3.620	3.755	3.894	4.039	4.189
21	Kalimantan Tengah	2.544	2.639	2.737	2.839	2.944
22	Kalimantan Selatan	8.819	9.147	9.487	9.840	10.205
23	Kalimantan Timur	2.998	3.109	3.225	3.345	3.469
24	Kalimantan Utara	774	803	833	864	896
25	Sulawesi Utara	2.173	2.253	2.337	2.424	2.514
26	Sulawesi Tengah	3.269	3.391	3.517	3.647	3.783
27	Sulawesi Selatan	20.424	21.183	21.971	22.788	23.635
28	Sulawesi Tenggara	7.372	7.646	7.931	8.225	8.531
29	Gorontalo	1.146	1.188	1.232	1.278	1.326
30	Sulawesi Barat	3.595	3.729	3.867	4.011	4.160
31	Maluku	1.636	1.696	1.760	1.825	1.893
32	Maluku Utara	472	490	508	527	547
33	Papua Barat	990	1.027	1.065	1.105	1.146
34	Papua	1.696	1.759	1.824	1.892	1.963
NASIONAL		255.863	265.374	275.240	285.472	296.084



PROYEKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024

(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	12.555	12.804	13.057	13.315	13.578
2	Sumatera Utara	522.562	532.893	543.428	554.172	565.127
3	Sumatera Barat	289.752	295.480	301.322	307.279	313.353
4	Riau	12.466	12.712	12.963	13.220	13.481
5	Jambi	23.151	23.609	24.075	24.551	25.037
6	Sumatera Selatan	139.511	142.269	145.082	147.950	150.875
7	Bengkulu	11.056	11.275	11.497	11.725	11.957
8	Lampung	133.411	136.048	138.738	141.481	144.278
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.789	11.002	11.220	11.442	11.668
10	Kepulauan Riau	14.264	14.546	14.833	15.126	15.426
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	478.141	487.594	497.234	507.064	517.088
13	Jawa Tengah	509.509	519.582	529.854	540.329	551.011
14	DI. Yogyakarta	64.088	65.355	66.647	67.964	69.308
15	Jawa Timur	1.664.766	1.697.678	1.731.240	1.765.466	1.800.369
16	Banten	208.416	212.537	216.738	221.023	225.393
17	Bali	189.994	193.750	197.580	201.486	205.470
18	Nusa Tenggara Barat	34.618	35.302	36.000	36.712	37.437



PROYEKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024 <i>lanjutan</i> (Ribu Ton)						
No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	9.369	9.554	9.743	9.935	10.132
20	Kalimantan Barat	117.684	120.010	122.383	124.802	127.270
21	Kalimantan Tengah	7.537	7.686	7.838	7.993	8.151
22	Kalimantan Selatan	88.492	90.242	92.026	93.845	95.700
23	Kalimantan Timur	34.006	34.678	35.363	36.063	36.775
24	Kalimantan Utara	619	631	644	656	669
25	Sulawesi Utara	27.113	27.650	28.196	28.754	29.322
26	Sulawesi Tengah	14.108	14.387	14.672	14.962	15.257
27	Sulawesi Selatan	198.528	202.453	206.455	210.537	214.699
28	Sulawesi Tenggara	2.888	2.945	3.003	3.062	3.123
29	Gorontalo	3.895	3.972	4.050	4.130	4.212
30	Sulawesi Barat	2.501	2.551	2.601	2.653	2.705
31	Maluku	631	644	657	670	683
32	Maluku Utara	90	92	94	96	97
33	Papua Barat	8.388	8.554	8.723	8.896	9.072
34	Papua	12.456	12.702	12.953	13.209	13.470
NASIONAL		4.847.355	4.943.185	5.040.909	5.140.566	5.242.193

Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI TELUR ITIK TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	7.883	8.143	8.412	8.689	8.976
2	Sumatera Utara	12.049	12.447	12.857	13.282	13.720
3	Sumatera Barat	6.592	6.810	7.035	7.267	7.506
4	Riau	1.771	1.830	1.890	1.952	2.017
5	Jambi	4.710	4.865	5.026	5.192	5.363
6	Sumatera Selatan	16.993	17.554	18.133	18.731	19.349
7	Bengkulu	1.099	1.136	1.173	1.212	1.252
8	Lampung	5.976	6.174	6.377	6.588	6.805
9	Kepulauan Bangka Belitung	489	505	522	539	557
10	Kepulauan Riau	240	248	256	265	273
11	DKI Jakarta	61	63	65	67	69
12	Jawa Barat	50.105	51.758	53.466	55.231	57.053
13	Jawa Tengah	38.332	39.596	40.903	42.253	43.647
14	DI. Yogyakarta	2.314	2.391	2.469	2.551	2.635
15	Jawa Timur	42.138	43.529	44.965	46.449	47.981
16	Banten	15.032	15.528	16.040	16.569	17.116
17	Bali	1.799	1.858	1.919	1.983	2.048
18	Nusa Tenggara Barat	5.716	5.905	6.100	6.301	6.509



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan

PROYEKSI TELUR ITIK TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	1.216	1.256	1.298	1.341	1.385
20	Kalimantan Barat	2.654	2.742	2.832	2.926	3.022
21	Kalimantan Tengah	1.732	1.789	1.848	1.909	1.972
22	Kalimantan Selatan	31.440	32.478	33.549	34.656	35.800
23	Kalimantan Timur	1.497	1.546	1.597	1.650	1.704
24	Kalimantan Utara	143	148	153	158	163
25	Sulawesi Utara	981	1.013	1.046	1.081	1.117
26	Sulawesi Tengah	8.738	9.026	9.324	9.632	9.949
27	Sulawesi Selatan	32.816	33.898	35.017	36.173	37.366
28	Sulawesi Tenggara	3.767	3.891	4.020	4.153	4.290
29	Gorontalo	437	451	466	481	497
30	Sulawesi Barat	2.187	2.260	2.334	2.411	2.491
31	Maluku	1.137	1.174	1.213	1.253	1.294
32	Maluku Utara	479	494	511	528	545
33	Papua Barat	600	619	640	661	683
34	Papua	593	613	633	654	676
NASIONAL		303.715	313.737	324.090	334.784	345.831



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI TELUR PUYUH TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	450	482	517	554	593
3	Sumatera Barat	2.727	2.921	3.130	3.354	3.593
4	Riau	224	240	257	275	295
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	245	262	281	301	323
8	Lampung	434	465	498	534	572
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
10	Kepulauan Riau	165	177	189	203	217
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1.612	1.727	1.851	1.983	2.125
13	Jawa Tengah	11.539	12.364	13.247	14.193	15.207
14	DI. Yogyakarta	3.201	3.430	3.675	3.937	4.219
15	Jawa Timur	5.057	5.419	5.806	6.220	6.665
16	Banten	50	54	58	62	66
17	Bali	17	18	20	21	23
18	Nusa Tenggara Barat	106	114	122	131	140



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan

PROYEKSI TELUR PUYUH TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	8	9	10	10	11
20	Kalimantan Barat	39	42	45	48	52
21	Kalimantan Tengah	80	86	92	98	105
22	Kalimantan Selatan	997	1.069	1.145	1.227	1.314
23	Kalimantan Timur	78	84	90	96	103
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	298	319	342	367	393
26	Sulawesi Tengah	202	216	231	248	266
27	Sulawesi Selatan	60	64	69	74	79
28	Sulawesi Tenggara	14	15	16	17	19
29	Gorontalo	72	77	83	88	95
30	Sulawesi Barat	2	2	2	2	3
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	29	31	33	36	38
NASIONAL		27.710	29.689	31.810	34.082	36.516



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI TELUR ITIK MANILA TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	3.797	3.850	3.904	3.959	4.015
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	31	32	32	33	33
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	639	648	657	666	676
8	Lampung	1.045	1.060	1.075	1.090	1.106
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	6	6	6	6	6
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	15.529	15.748	15.970	16.194	16.422
13	Jawa Tengah	2.515	2.550	2.586	2.623	2.660
14	DI. Yogyakarta	387	393	398	404	410
15	Jawa Timur	1.717	1.741	1.766	1.791	1.816
16	Banten	938	951	964	978	992
17	Bali	157	159	161	163	166
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan
PROYEKSI TELUR ITIK MANILA TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

No.	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2024
19	Nusa Tenggara Timur	165	167	169	174
20	Kalimantan Barat	38	39	39	40
21	Kalimantan Tengah	22	22	22	23
22	Kalimantan Selatan	93	95	96	99
23	Kalimantan Timur	239	243	246	253
24	Kalimantan Utara	82	83	85	87
25	Sulawesi Utara	307	311	316	325
26	Sulawesi Tengah	489	496	503	517
27	Sulawesi Selatan	5.790	5.871	5.954	6.123
28	Sulawesi Tenggara	242	245	249	256
29	Gorontalo	99	101	102	105
30	Sulawesi Barat	140	142	144	148
31	Maluku	-	-	-	-
32	Maluku Utara	251	254	258	265
33	Papua Barat	13	13	13	14
34	Papua	431	437	443	455
NASIONAL		35.161	35.656	36.158	37.183



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

PROYEKSI PRODUKSI SUSU TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	4.174	4.283	4.398	4.522	4.653
3	Sumatera Barat	1.058	1.086	1.115	1.146	1.179
4	Riau	58	59	61	63	65
5	Jambi	8	8	9	9	9
6	Sumatera Selatan	58	60	61	63	65
7	Bengkulu	488	501	514	529	544
8	Lampung	1.533	1.573	1.615	1.660	1.709
9	Kepulauan Bangka Belitung	162	166	171	175	180
10	Kepulauan Riau	8	8	8	8	8
11	DKI Jakarta	5.211	5.346	5.490	5.644	5.808
12	Jawa Barat	299.828	307.624	315.930	324.776	334.194
13	Jawa Tengah	102.083	104.737	107.565	110.576	113.783
14	DI. Yogyakarta	5.528	5.672	5.825	5.988	6.162
15	Jawa Timur	545.686	559.874	574.991	591.091	608.232
16	Banten	53	55	56	58	60
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-



Lampiran 1.
Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

lanjutan

PROYEKSI PRODUKSI SUSU TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	23	24	24	25	26
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	144	148	152	156	160
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	22	23	23	24	24
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	1.960	2.011	2.066	2.123	2.185
28	Sulawesi Tenggara	65	66	68	70	72
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
NASIONAL		968.151	993.322	1.020.142	1.048.706	1.079.119



Lampiran 2.
Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT													
Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak													
Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	4.480,8 ribu ton		0,4	0,85	1,2	1,24	1,28					
Peningkatan Produksi susu	%	944,54 ribu ton		2,5	2,6	2,7	2,8	2,9					
Peningkatan Produksi telur	%	5354,62 ribu ton		2,15	2,15	2,16	2,16	2,16					
Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan													
Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan	%	US\$ 744,3 ribu		15	15	20	25	30					
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak													
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81		81,5	82	82,5	83	83,5					
Tersedianya sarana peternakan													
Tingkat pemanfaatan sarana prasarana peternakan	%			85	87	90	92	95					
Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis													
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80		80	80,5	80,5	81	81					
Terkendalnya kasus zoonosis pada manusia													
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	122		122	120	118	116	114					
Tervujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai			32,3	32,75	33,5	34	34,5					

Lampiran 2.

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)			3,37	3,44	3,51	3,55	3,58
Terkelolanya Anggaran Dijten Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akutabel dan Berkualitas								
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	87,82		88,25	88,68	88,93	90,32	90,85
Peningkatan Produksi Pakan Ternak				77.088				
Terpenuhiya pakan ternak sesuai kebutuhan				Pusat				
Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi	Ton			26.883.537	27.891.703	29.011.374	30.253.677	31.630.622
Jumlah pakan ternak kerbau untuk produksi	Ton			1.469.695	1.482.922	1.498.811	1.518.432	1.541.926
Jumlah pakan ternak kambing dan domba untuk produksi	Ton			14.020.112	14.171.382	14.322.652	14.476.777	14.632.198
Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi	Ton			9.464.113	9.758.424	10.052.734	10.347.045	10.641.356
Jumlah pakan ternak tik untuk produksi	Ton			654.948	675.315	695.682	715.475	736.417
Jumlah pakan ternak babi untuk produksi	Ton			4.374.966	4.421.346	4.467.323	4.514.229	4.561.629
Terpenuhiya pakan ternak perah sesuai kebutuhan				Pusat				
Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi, kerbau, kambing)	Ton			6.126.555	6.264.828	6.413.738	6.583.920	6.775.375



Lampiran 2.
Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhiya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan													
Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur	Ton		Pusat	13.007.193	13.280.990	13.553.714	13.825.116	14.102.574					
Tersedianya sarana prasarana pakan ternak													
Tingkat pemanfaatan sarana prasarana pakan	%		Pusat	85	87	90	92	95					
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan													
Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan													
Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)													
Rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak per negara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)													
Rasio ekspor obat hewan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan : mutu dan keamanan)													
				171.603	306.266	362.046	416.352	478.805					



Lampiran 2.

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran/Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis													
Pusat													
Rasio ternak sapi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (diseuaikan dinamika populasi)	%			2.74	2.74	2.6	2.5	2.4					
Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing (diseuaikan dinamika populasi)	%			3.21	3.21	3.15	3	2.9					
Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing	%			9.61	9.61	9.4	9.2	9					
Rasio ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba	%			8.53	8.53	8.3	8.1	7.9					
Rasio ternak ayam ras yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras	%			25.51	25.51	25.4	25.3	25.2					
Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging	%			4.42	4.42	4.3	4.2	4.1					
Rasio ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik	%			9.01	9.01	8.9	8.7	8.5					
Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi	%			19.53	19.53	19.3	19.1	18.9					

Lampiran 2.
Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis													
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80	Pusat	80	80,5	80,5	81	81					
Meningkatnya kesehatan ternak perah													
Rasio ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah	%		Pusat	3,79	2,94	2,8	2,7	2,6					
Meningkatnya kesehatan ayam petelur													
Rasio ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur	%		Pusat	4,24	4,24	3,9	3,8	3,7					
Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan													
Tingkat pemanfaatan sarana prasana kesehatan hewan	%		Pusat	91	92	92	92	92					
Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak													
Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor													
Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak untuk ekspor nasional	%		Pusat	20	20	15	15	15	619.446	1.175.866	1.501.005	1.674.350	1.851.718
Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak untuk ekspor nasional	%		Pusat	20	20	15	15	15					
(alasan pendilakan : mutu ternak)													

Lampiran 2.

Terpenuhiya Topulasi ternak sesuai kebutuhan produksi					
		Pusat			
Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.142.648	2.223.000	2.312.239	2.411.252
Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	130.162	131.333	132.741	134.478
Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.977.698	4.019.912	4.062.127	4.105.137
Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	4.629.869	4.680.526	4.731.183	4.782.796
Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.064.480.237	3.097.912.245	3.191.344.252	3.284.776.260
Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor	30.770.385	31.727.269	32.684.153	33.614.037
Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.995.403	4.037.355	4.079.747	4.122.584
Terpenuhiya bibit ternak sesuai kebutuhan					
Jumlah betina produktif ternak sapi potong yang diajukan	Ekor	2.657.090	2.757.261	2.868.590	2.992.134
Jumlah betina produktif ternak kerbau potong yang diajukan	Ekor	372.372	376.361	381.288	387.188

Lampiran 2.
Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah betina produktif ternak kambing potong yang diajukan	Ekor			3.672.382	3.687.696	3.703.072	3.718.514	3.734.019					
Jumlah betina produktif ternak domba potong yang diajukan	Ekor			3.606.858	3.685.921	3.766.718	3.849.285	3.933.662					
Jumlah betina produktif ternak ayam yang diajukan	Ekor			17.350.891	17.890.461	18.430.031	18.969.602	19.509.172					
Jumlah betina produktif ternak itik yang diajukan	Ekor			190.883	196.819	202.691	208.691	214.627					
Jumlah betina produktif ternak babi potong yang diajukan	Ekor			463.131	477.213	491.770	506.749	522.203					
Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan				Pusat									
Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan	%			90	90	90	90	90					
Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan	%			90	90	90	90	90					
Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu				Pusat									
Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan	%			70	75	80	85	90					

Lampiran 2.

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional			Pusat												
Produksi susu	Ton			968.150	993.320	1.020.140	1.048.710	1.079.120							
Jumlah betina produktif ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu	Ekor			308.160	315.115	322.605	331.165	340.795							
Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional			Pusat												
Produksi telur	Ton			4.795.165	4.896.101	4.996.643	5.096.696	5.198.982							
Jumlah betina produktif ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur	Ekor			267.913.341	273.552.827	279.170.226	284.760.370	290.475.270							
Tersedianya sarana prasarana perbaikan dan produksi ternak			Pusat												
Tingkat pemanfaatan sarana prasana perbibitan dan produksi ternak	%			90	91	92	93	95							
Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)									30.369	76.816	92.947	102.242		112.466	
Meningkatnya produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan ekspor terkait alasan mutu dan keamanan produk			Pusat												

Lampiran 2.
Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk ekspor produk per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk)	%			0	0	0	0	0					
Meningkatnya daging yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat													
Pusat													
Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	%	15,7		17,5	20,2	23,8	28,3	33,7					
Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong	%	48,3		51,3	52	52,8	53,5	54,3					
Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong	%	1,7		1,7	1,7	2,5	3,3	3,3					
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak													
Pusat													
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81		81,5	82	82,5	83	83,5					

Lampiran 2.

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terkendalanya kasus zoonosis pada manusia													
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi/penularan kepada manusia	Kasus	122		122	120	118	116	114					
Meningkatnya produk susu dan telur yang berstatus sehat untuk dikonsumsi masyarakat													
			Pusat										
Rasio produk susu yang berstatus sehat terhadap total produk susu yang dihasilkan	%	88		88,2	88,5	89	89,2	89,5					
Rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap total produk telur yang dihasilkan	%	95		95,2	95,5	95,7	96	96,2					
Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner													
			Pusat										
Tingkat pemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner	%	90		90	92	93	95	95					
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak													
			Pusat										
Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan									25.829	65.484	87.438	100.554	120.664
Nilai ekspor hewan hidup	US\$ 000	66.038		75.944	87.335	104.802	131.003	170.304					
Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan	US\$ 000	523.890		602.474	692.845	831.414	1.039.267	1.351.047					
Nilai ekspor produk non pangan	US\$ 000	138.127		158.846	182.673	219.208	274.010	356.213					

Lampiran 2.
Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai ekspor obat hewan	US\$ 000	14,127		16.245	18.682	22.419	28.023	36.430					
Nilai ekspor benih dan bibit ternak	US\$ 000	2196		2.526	2.905	3.486	4.357	5.664					
Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	1,49		1,88	2,59	3,64	4,26	5,14					
Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan													
Pusat													
Tingkat pemanfaatan sarana prasana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	5,60		85	87	90	92	95					
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan													
375.243 352.915 433.969 439.759 445.694													
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
Pusat													
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai			32,3	32,75	33,5	34	35,5					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)			3,37	3,44	3,51	3,55	3,58					
Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas													
Pusat													
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	87,82		88,25	88,68	88,93	90,32	90,85					





**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Pertanian Gedung C

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan,
Jakarta 12550

Telp. : (021) 7815380-4

Fax. : (021) 7815486-7815586

website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>